

**MAKNA GELAR HAJI BAGI PARA ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PARTAI
NASIONALIS KABUPATEN TEGAL**

Skripsi

Program Sarjana (S1)

Program Studi Manajemen Haji dan Umrah



Oleh:

ANISA IFADAH

2001056032

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**

LEMBAR PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
Skripsi dengan Judul :
**MAKNA GELAR HAJI BAGI ANGGOTA DPRD PARTAI NASIONALIS
KABUPATEN TEGAL**

Disusun Oleh:
Anisa Ifadah
2001056032

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 29 Desember 2023 dan dinyatakan telah lulus memenuhi
syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I



Dr. Hasvim Hasanah, M.S.I
NIP. 198203022007102001
Penguji III

Sekretaris/Penguji II



Dr. H. Abdul Sattar, M.Ag
NIP. 197308141998031001
Penguji IV



Dr. Hatta Abdul Malik, M.S.I
NIP. 198003112007101001



Drs. H. Ahmad Anas, M.Ag
NIP. 196605131993031002

Mengetahui Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. H. Abdul Sattar, M.Ag
NIP. 197308141998031001

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Pada Tanggal, Januari 2024



Dr. H. Ilyas Supena, M. Ag
NIP. 197204102001121003

NOTA PEMBIMBING



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. 024 7601291 Semarang 50185

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 1 bendel
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa proposal skripsi saudara :

Nama : **ANISA IFADAH**
NIM : **2001056032**
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan/ Konsentrasi : Manajemen Haji dan Umrah
Judul :

“MAKNA GELAR HAJI BAGI PARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PARTAI NASIONALIS KABUPATEN TEGAL”

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 21 Desember 2023

Pembimbing

Dr. H. Abdul Sattar M. Ag
NIP.1973081419988031001

HALAMAN PERNYATAAN

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anisa Ifadah

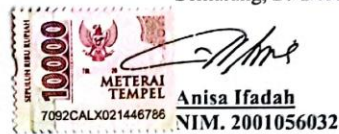
NIM : 2001056032

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil usaha saya sendiri dan tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kerja sama disalah satu perguruan tinggi di Lembaga Pendidikan lainnya. Pengetahuan diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan. Adapun sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 20 Desember 2023



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan kemampuan kepada penulis sehingga berkat rahmat dan kasih sayang-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik, Salawat dan salam tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mendobrak pintu kebatilan dan kezaliman menuju kemerdekaan.

Adapun judul skripsi ini **“Makna Gelar Haji Bagi Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Partai Nasionalis Kabupaten Tegal”** maka penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Atas dukungan dan kontribusi dari beberapa pihan baik moril maupun materil, penulis merasa berhutang budi dan tidak mampu membalasnya. Maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. Rektor UIN Walisongo Semarang, yang telah mengelola penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana mestinya.
2. Prof. Dr. Ilyas Supena, M,Ag. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, beserta staf pembantu dekan, yang telah mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di fakultas.
3. Dr. H. Abdul Sattar, M.Ag. Ketua Program Studi Manajemen Haji dan Umrah, Dr. Hasyim Hasanah, M.Si. Sekretaris Program Studi Manajemen Haji dan Umrah yang selalu memfasilitasi mahasiswa Manajemen Haji dan Umrah, memberikan contoh yang baik dan tak pernah lelah memotivasi, semoga Allah SWT membalas kebaikan beliau dan memberikan keberkahan.
4. Dr. H. Abdul Sattar, M.Ag. Dosen pembimbing skripsi yang selalu sabar membimbing menulis dan telah memberikan saran-saran ataupun arahan selama penulis duduk dibangku perkuliahan.
5. Segenap jajaran dosen dan civitas akademik Universitas Islam Negeri Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, khususnya program studi Manajemen Haji dan Umrah yang Ikhlas,

tulus dan sabar untuk mendidik kami agar menjadi manusia yang berakhlak mulia berintelektual.

6. Anggota DPRD Kabupaten Tegal khususnya yang sudah melaksanakan ibadah haji dari partai politik bergaris nasionalis yang sudah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal. Penulis mengucapkan beribu terima kasih. Semoga silaturahmi semakin erat.
7. Teman-teman seperjuangan dan senasib Manajemen Haji dan Umrah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam hal ini penulis ucapkan terima kasih telah menerima sebagai teman dan membantu dalam segala hal, bahkan dalam penulisan skripsi ini. Semoga pertemanan kita ini tak lekang oleh waktu.
8. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Mandiri Inisiatif terprogram (KKN MIT KE-16) Posko 125 yang selalu mendukung dan mendoakan dalam penulisan skripsi ini.

Teruntuk kedua orang tua tercinta Abah Khamdan dan Umi Masturoh berserta kakak saya tercinta Moh. Ibnu Affan, Muhammad Rifqi Habibi, Elok Maulidah yang telah sepenuh hati dan jiwa raganya selalu memberi semangat dan mendukung baik secara moril maupun materiel, yang tidak pernah menuntut apa pun serta tak henti-hentinya mengirimkan doa terbaik kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka seperti doa mereka.

Semarang, 20 Desember 2023

Anisa Ifadah
NIM. 2001056032

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan Rahmat serta nikmat-Nya sehingga skripsi ini telah terselesaikan. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, saya persembahkan karya tulis ini untuk orang-orang yang selalu mendukung dan memotivasi. Persembahan ini saya berikan kepada :

1. Abah tercinta Abah Khamdan dan Umi tersayang Umi Siti Masturoh yang tiada hentinya memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil, kasih sayang dan doa yang selalu dipanjatkan demi kelancaran dan kesuksesan penulis dalam menyusun skripsi ini.
2. Kakak-kakakku tersayang Moh. Ibnu Affan. Muhammad Rifqi Habibi dan Elok Maulidah yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

MOTTO

“Dunia selalu memberi tantangan tetapi doa orang tua selalu memberi kekuatan”

ABSTRAK

Anisa Ifadah (2001056032) dengan judul “Makna Gelar Haji bagi Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Partai Nasionalis Kabupaten Tegal)”.

Setiap umat memiliki keinginan untuk melaksanakan ibadah haji sebagai penyempurnaan rukun Islam yang kelima. Seseorang yang sudah melaksanakan ibadah haji mendapatkan sebuah pengalaman, makna dan status sosial. Karena gelar haji bagi masyarakat memberikan pengaruh terhadap status seseorang sebelum melaksanakan ibadah haji dan setelah melaksanakan ibadah haji. Dalam konteks status sosial masyarakat menganggap bahwa orang yang sudah berhaji merupakan orang yang berada pada lapisan atas dalam lingkungan masyarakat. Salah satunya anggota DPRD. Penelitian ini mengkaji gambaran predikat gelar haji bagi anggota legislatif partai yang berideologi nasionalis di Kabupaten Tegal.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis makna gelar haji bagi para anggota DPRD partai nasionalis Kabupaten Tegal. Jenis penelitian ini lapangan dengan menggunakan pendekatan ilmu sosiologis serta penelitian ini bersifat deskriptif. Analisis data penelitian ini menggunakan teori Miles dan Huberman dengan empat tahapan yaitu pengumpulan data, mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini dibagi dalam tiga makna gelar haji yakni. gelar haji anggota DPRD Kabupaten Tegal sebagai identitas muslim, gelar haji anggota DPRD Kabupaten Tegal sebagai status sosial dan gelar haji anggota DPRD Kabupaten Tegal sebagai calon legislatif.

Kata kunci : Makna, Gelar Haji, DPRD Partai Nasionalis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN	ii
KATA PENGANTAR	iv
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
D. Tinjauan Pustaka	4
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	9
2. Sumber dan Jenis Data	10
3. Teknik Pengumpulan Data	11
4. Teknik Keabsahan Data	12
F. Sistematika Penulisan Skripsi	14
BAB II	16
KERANGKA TEORI	16
A. Gelar Haji	16
B. Haji dalam politik dan sosiologi	20
C. DPRD Partai Nasionalis	23
D. Hubungan Makna Gelar Haji dengan Posisi Kepartaian	28
BAB III	30
PROFIL ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN TEGAL	30
A. Gambaran Umum Anggota DPRD Partai Nasionalis	30
1. Profil anggota DPRD Kabupaten Tegal	30
2. Visi dan Misi DPRD Kabupaten Tegal	32

3. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD	33
4. Struktur organisasi.....	33
5. Lokasi kantor DPRD Kabupaten Tegal.....	34
6. Latar Belakang Pekerjaan Anggota DPRD Sebelum Menjadi Anggota DPRD.....	34
7. Rangkaian pelaksanaan ibadah haji di Kabupaten Tegal.....	35
8 Kondisi Keagamaan anggota DPRD Partai Nasionalis Kabupaten Tegal	35
BAB IV	40
HASIL DAN PEMBAHASAN MAKNA GELAR HAJI BAGI ANGGOTA DPRD PARTAI NASIONALIS KABUPATEN TEGAL	40
A. Gelar Haji Anggota DPRD Partai Nasionalis Kabupaten Tegal Dalam Bentuk Identitas Muslim.....	40
B. Gelar Haji bagi Anggota DPRD Partai Nasionalis Kabupaten Tegal Sebagai Status Sosial	46
C. Gelar Haji Sebagai Calon Anggota DPRD Partai Nasionalis Kabupaten Tegal	49
BAB V.....	60
PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	65

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Daftar Nama Anggota DPRD Kabupaten Tegal	31
Tabel 3. 2 Anggota DPRD Partai Nasionalis yang Sudah Melaksanakan Haji	32
Tabel 3. 3 Tahun Keberangkatan Haji Anggota DPRD Partai Nasionalis.....	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Kampanye Calon Anggota Legislatif.....	52
Gambar 4. 2 Nofiatul Faroh, Anggota DPRD Kabupaten Tegal Fraksi PKB	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap umat muslim memiliki keinginan untuk melaksanakan ibadah haji karena ibadah haji merupakan perintah dalam agama Islam yang diwajibkan kepada seluruh umat Islam yang mampu secara lahir dan batin. Ibadah haji merupakan ibadah mahdhah yang menduduki peringkat pertama diminati oleh masyarakat.¹ Melihat data jamaah haji Indonesia setiap tahunnya mendapat kuota dari Arab Saudi berubah-ubah dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 Indonesia mendapat kuota sebanyak 221.000 dan mendapat kuota tambahan sebanyak 8000.² Sedangkan kuota jamaah haji untuk jamaah dari Kabupaten Tegal sebanyak 944 jamaah.³

Seseorang yang telah melaksanakan ibadah haji maka secara langsung akan mendapatkan gelar *Haji*. Gelar haji tersebut akan digunakan di depan namanya.⁴ Gelar haji bagi orang yang sudah melaksanakan ibadah haji berawal pada masa penjajahan abad XIX, pada saat itu ibadah haji menjadi sarana agar penduduk Hindia Belanda mengetahui tentang kemerdekaan bangsanya, maka dari itu orang-orang yang saat itu sudah berhaji sebagai penggerak anti penjajahan.

Seseorang yang sudah melaksanakan ibadah haji mendapatkan sebuah pengalaman, makna dan status sosial. Karena gelar haji bagi masyarakat memberikan pengaruh terhadap status seseorang sebelum melaksanakan ibadah haji dan setelah melaksanakan ibadah haji. Dalam konteks status sosial masyarakat menganggap bahwa orang yang sudah berhaji merupakan orang yang berada pada lapisan atas dalam lingkungan masyarakat.

¹ Budi Kisworo, "Ibadah Haji Di Tinjau Dari Berbagai Aspek". *Jurnal Hukum Islam*, no 1, (2017). Hal. 76.

² <https://dki.kemenag.go.id/storage/files/128-230223042047-63f72fef768f5.pdf>, diakses pada Hari Kamis, 18 Mei 2023.

³ https://utama.tegalkab.go.id/news/view/berita/bupati_tegal_umi_azizah_lepas_jemaah_calon_haji_2023_20230531145643, diakses pada Hari Kamis, 18 Mei 2023.

⁴ Samsul Bahri *Makna Haji dan Status Sosial Perspektif Masyarakat*. (Tesis S2 Universitas Islam Negeri Mataram 2021). Hal. 73.

Studi yang dilakukan oleh Bela Fitri Wulandari pada tahun 2023, orang yang sudah atau selesai melaksanakan ibadah haji dianggap orang yang shaleh, suci dan memiliki agama yang berkualitas salah satunya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).⁵ Anggota DPRD yang sudah berhaji tidak semuanya memiliki kualitas agama yang bagus, karena setiap latar belakang ilmu agama yang dimiliki oleh setiap anggota DPRD berbeda-beda.

Setelah menelaah dari beberapa penelitian yang mengkaji mengenai gelar haji dan status sosial. Di antaranya seperti latar belakang pemakaian gelar haji dan pemakaian gelar haji di lingkungan masyarakat. Penelitian yang ada belum ditemukan kajian yang membahas khusus mengenai makna gelar haji bagi anggota DPRD partai nasionalis. Beberapa penelitian yang ditemukan belum membahas problem tersebut secara komprehensif. Beberapa penelitian lainnya lebih fokus pada makna gelar haji dan status sosial secara umum. Penelitian ini membahas gelar haji bagi anggota DPRD partai nasionalis melalui kajian analisis makna. Anggota DPRD Kabupaten Tegal yang sudah melaksanakan ibadah haji sebanyak 28% dari jumlah 50 anggota DPRD. Penulis tidak memilih anggota DPRD dari semua partai, melainkan memilih subjek yaitu anggota DPRD dari partai nasionalis.

Peneliti memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Partai Nasionalis Kabupaten Tegal karena partai nasionalis senantiasa dihubungkan dengan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno telah ditempatkan sebagai peletak dasar gagasan nasionalis. Sepanjang masa kepartaian politik di Indonesia, partai nasionalis terus menghiiasi keadaan politik nasional, sama halnya dengan partai politik Islami keberadaan partai nasionalis sering kali dipertentangkan dengan partai-partai Islam. Partai-partai Islam cenderung meletakkan dasar agama dalam

⁵ Bela Fitri Wulandari, Gelar Haji Sebagai Stratifikasi Sosial Pada Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, Vol. 6, 1 (2023). Hal. 7.

argumentasi bernegara, sedangkan partai nasionalis cenderung berusaha memisahkan antara agama dengan negara.⁶

Dalam konteks politik gelar haji dapat menjadi pengaruh alat politik dengan mempengaruhi persuasi dari masyarakat terutama masyarakat yang beragama Islam yang sangat menekankan pentingnya agama dalam kehidupan. Namun, pengaruh gelar haji terhadap karier politik seseorang tergantung beberapa faktor seperti kinerja, pengalaman dan rekam jejak politik yang dimilikinya. Berangkat dari permasalahan ini, penulis ingin melengkapi pentingnya makna gelar haji bagi para anggota DPRD, Maka dari itu penulis mbingkainya dalam sebuah tema yang berjudul **“MAKNA GELAR HAJI BAGI PARA ANGGOTA DPRD PARTAI NASIONALIS KABUPATEN TEGAL”**

B. Rumusan Masalah

Apa makna gelar haji bagi para anggota DPRD partai nasionalis Kabupaten Tegal?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat penelitian berisi apa yang hendak dicapai penulis dalam melakukan penelitian. Tujuan berarti sebuah target atau capaian melakukan sebuah penelitian. Sedangkan manfaat berarti keuntungan yang didapatkan dari dilakukannya suatu penelitian.

1. Tujuan Penelitian

Mendeskripsikan makna gelar haji bagi para anggota DPRD partai nasionalis Kabupaten Tegal.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat yang mencakup ke dalam dua hal yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

⁶Sigit Pamungkas, *Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia*. (Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism, 2011) Hal. 119.

a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan mengenai makna gelar haji bagi para anggota DPRD partai nasionalis.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, manfaat penelitian ini memberikan catatan baru mengenai makna gelar haji bagi para anggota DPRD partai nasionalis.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dihadirkan sebagai tahap awal sebelum penulis mengkaji lebih lanjut penelitian. Data-data ditampilkan sebagai bahan perbandingan dalam menganalisis serta untuk memahami permasalahan yang ada. Setelah ditelusuri lebih lanjut, masih sedikit penulis yang meneliti tentang makna gelar haji secara spesifik. Beberapa penelitian lain dapat diklasifikasikan berdasarkan fokus bahasanya.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nanang Saptono pada tahun 2019 yang berjudul *Latar Belakang Pemakaian Gelar Haji*. Studi tersebut bertujuan mengetahui alasan gelar haji digunakan oleh orang Islam yang telah melaksanakan ibadah haji. Penelitian tersebut termasuk menggunakan metode kualitatif teknik yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada awal penyebaran Islam di Indonesia khususnya di pulau Jawa belum diterapkan kepada orang muslim yang sudah menunaikan ibadah haji. Berdasarkan tulisan sejarah dari Banten, gelar haji di terapkan pada masa Pangeran Ratu tepatnya tahun 1596 sampai 1647 kepada Jayasanta dan Haji Wangsaraja. Penerapan gelar haji merupakan asimilasi karena gelar tersebut sebelumnya sudah digunakan yang berkaitan dengan sesuatu yang dihormati, dengan demikian bahwa gelar haji bukan diberikan kepada orang yang sudah berhaji tetapi gelar haji tersebut diberikan kepada orang muslim yang sudah

melaksanakan rukun Islam kelima.⁷ Penelitian tersebut menjelaskan sejarah awal mula gelar haji di gunakan. Perbedaan penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek penelitian dan metode yang digunakan. Penulis mengambil objek yang akan diteliti yaitu menganalisis makna ibadah haji bagi para anggota DPRD partai nasionalis Kabupaten Tegal dan metode yang digunakan kualitatif deskriptif.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Samsul Bahri pada tahun 2021 yang berjudul “*Makna Haji dan Status Sosial Perspektif Masyarakat*” studi tersebut bertujuan untuk mengetahui makna haji bagi masyarakat Jonggat dan mengetahui status sosial yang diberikan masyarakat Jonggat terhadap masyarakat bergelar haji. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dimana penulis dituntut untuk lebih banyak menggunakan logika, lokasi penelitian ini berlokasi di Lombok Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa haji bagi masyarakat Jonggat memunculkan tiga makna yaitu makna religius, makna sosial dan makna ekonomi. Status sosial haji bagi masyarakat Jonggat merupakan implikasi terhadap masyarakat yang telah melaksanakan ibadah haji seperti masyarakat yang telah melaksanakan ibadah haji ditempatkan pada stratifikasi masyarakat yang tinggi.⁸ Penelitian tersebut menjelaskan makna haji dan status sosial menurut perspektif masyarakat. Perbedaan penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek penelitian, yaitu makna gelar haji bagi para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari partai nasionalis Kabupaten Tegal.

Ketiga penelitian yang di lakukan oleh Firda, Jamaluddin Hos dan Amba Upe pada tahun 2019 yang berjudul “*Makna Sosial Haji Pada Suku Bugis*” Studi di Kelurahan Kastarib Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui motivasi dalam berhaji bagi suku Bugis di Kelurahan Kastarib Kecamatan Poleang

⁷ Nanang Saptono, “Latar Belakang Pemakaian Gelar Haji”, *Jurnal Ateologi Balai Jawa Barat*, Vol 1, no. 2, (2019). Hal. 78.

⁸ Samsul Bahri, “*Makna Haji dan Status Sosial Perspektif Masyarakat*. (Tesis S2 UIN Mataram, 2021). Hal. 73.

Kabupaten Bombana, dan untuk mengetahui makna simbolik haji pada suku Bugis di Kelurahan Kastarib Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa suku Bugis dalam berhaji di didasarkan pada motivasi penyempurnaan rukun Islam dan menaikkan status sosial. Makna simbolik haji pada suku Bugis ada tiga yaitu, simbol kekayaan, simbol kehormatan dan simbol ketakwaan.⁹ Penelitian tersebut menjelaskan makna sosial haji pada suku Bugis. Perbedaan penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu pada objek penelitian, yaitu mengetahui makna gelar haji bagi para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari partai nasionalis Kabupaten Tegal.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Zella Famelia pada tahun 2023 yang berjudul “*Makna Gelar Haji Pada Masyarakat Urban Dalam Menumbuhkan Kesalehan Sosial*” (Studi di Perumahan BPI Ngaliyan) yang bertujuan untuk mengetahui analisis makna gelar haji pada masyarakat urban di Perumahan BPI Ngaliyan Semarang dan mendeskripsikan makna gelar haji pada masyarakat urban di Perumahan BPI Ngaliyan Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa makna gelar haji bagi masyarakat urban di Perumahan BPI Ngaliyan memiliki empat makna yaitu makna normatif, budaya, histori dan sosiologi. Pertama, makna normatif bahwa gelar haji memang diperoleh bagi orang yang sudah berhaji karena telah menuntaskan rukun Islam yang kelima. Kedua, makna budaya bahwa gelar haji memang di pandang sudah menjadi suatu budaya meski di wilayah perkotaan. Ketiga, gelar haji bermakna historis karena muncul atas kepentingan zaman kolonial, yang artinya masih adanya pengaruh kolonialisme hingga berdampak terhadap eksistensi gelar haji saat ini.

⁹ Firda, Jamaluddin Hos dan Ambo Upe, “Makna Sosial Haji Pada Suku Bugis”. *Jurnal Neo Societal* Vol 4, no. 2 (2019). Hal. 4.

Keempat, gelar haji bermakna sosiologi karena merupakan gelar yang diperoleh karena usaha.¹⁰ Penelitian ini sama-sama mengkaji mengenai makna, hanya saja penelitian ini membahas pada makna gelar haji bagi masyarakat urban, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih menekankan pada makna gelar haji bagi anggota DPRD partai nasionalis Kabupaten Tegal itu seperti apa, ada atau tidaknya dampak signifikan makna menyandang gelar bagi anggota DPRD dalam dunia politik.

Kelima, studi oleh M. Zainuddin tahun 2013 yang berjudul *Haji dan Status Sosial : Studi Tentang Simbol Agama di kalangan Masyarakat Muslim*. studi tersebut bertujuan mengungkapkan fenomena haji dalam masyarakat Indonesia, terutama di Jawa, secara sosiologis. Studi ini menunjukkan bahwa ibadah haji yang dilakukan oleh mayoritas muslim Indonesia dipenuhi dengan atribut-atribut sosial. Meski merupakan salah satu pilar agama, ibadah haji telah digunakan elit penguasa lokal sebagai sumber daya politik atau alat membangun legitimasi kekuasaan. Penelitian tersebut termasuk menggunakan metode kualitatif teknik yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks status sosial, haji tidak sekedar memiliki makna sebagai doktrin keagamaan semata, tetapi telah mengalami perluasan persepsi sebagai institusi yang mampu menjaga nilai-nilai lokal. Hal ini terjadi pada masyarakat pedagang Betawi. Pilihan yang paling populer di kalangan pedagang yang ingin menaikkan status sosialnya yaitu dengan melaksanakan haji. Penelitian di Kabupaten Malang juga menunjukkan hasil yang serupa bahwa melaksanakan ibadah haji dikalangan masyarakat petani Santri Godanglegi merupakan ibadah yang sangat istimewa. Di kalangan masyarakat muslim Madura dan sebagian Jawa ada tradisi mengganti nama lama menjadi nama baru yang diberikan oleh seorang Syeikh di Makkah. Penggantian nama ini bagi masyarakat pedesaan Madura seolah-olah

¹⁰Zella Famelia, "Makna Gelar Haji Pada Masyarakat Urban Dalam Menumbuhkan Kesalehan Sosial". Studi Kasus di Perumahan BPI Ngaliyan Semarang. (UIN Walisongo Semarang 2023). Hal. 74-76.

merupakan suatu keharusan, misalnya dari nama Kailan, setelah pulang dari haji diganti dengan Abdussyakur.¹¹ Penelitian tersebut memiliki ruang lingkup yang masih umum. Adapun perbedaan penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada responden, objek penelitian dan metode yang digunakan. Penulis mengambil responden anggota DPRD partai nasionalis Kabupaten Tegal, objek yang akan diteliti adalah makna ibadah haji bagi para anggota DPRD partai nasionalis Kabupaten Tegal dan metode pada kajian berikutnya lebih deskriptif dan naturalis.

Keenam, penelitian dilakukan oleh Aldhania Uswatun Hasanah pada tahun 2023 yang berjudul “*Kolonialisasi Gelar Haji : Inisiasi Belanda Waspada Perlawanan Umat*”. Pada penelitian ini bertujuan mengetahui kolonialisasi ibadah haji yang dilakukan oleh pemerintah Belanda berdampak pada kekhawatiran umat muslim pribumi, Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif pendekatan histografi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dominasi politik haji yang dilakukan oleh kolonial belanda pada masa penjajahan sangat kental, hal ini didasari dengan adanya berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah belanda yang sangat memberatkan jamaah yang akan melaksanakan ibadah haji ke tanah suci dengan alasan kewaspadaan dan kekhawatirannya terhadap masyarakat pribumi yang berhaji. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pada pendekatan, pendekatan yang dilakukan oleh peneliti menggunakan pendekatan sosiologi.¹²

Ketujuh, penelitian dari Zukmawati pada tahun 2018 yang berjudul “*Makna Simbolik Haji (Studi pada Kelurahan Tonrorita Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa)*”. Penelitian ini bertujuan untuk Makna Simbolik Haji bagi masyarakat di Kelurahan Tonrorita Kec.Biringbulu Kab.Gowa. Untuk mengetahui penghargaan masyarakat bagi orang yang bergelar haji di Kelurahan Tonrorita Kec. Biringbulu. Penelitian ini

¹¹ M. Zainuddin, *Haji dan Status Sosial: Studi Tentang Simbol Agama di Kalangan Masyarakat Muslim. Jurnal el Harakah* , Vol 15, no 2, (2013). Hal. 179-180.

¹² Aldhania Uswatun Hasanah, *Kolonialisasi Gelar Haji : Inisiasi Belanda Waspada Perlawanan Umat, Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemsyarakatan*. Vol. 17, no. 4 (2023) Hal 2-4

menggunakan pendekatan kualitatif yaitu deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa makna simbolik haji pada masyarakat Tonrorita lebih mengarah kepada simbolik penampilan fisik seperti menggunakan kopyah putih yang menandakan mereka telah melaksanakan ibadah haji.¹³ Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu membahas mengenai makna haji yang menekankan pada simbolik haji. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih menekankan kepada makna gelar bagi setiap anggota DPRD partai nasionalis dalam tiga kapasitas yaitu sebagai muslim. Sebagai anggota DPRD dan sebagai calon legislatif periode 2024.

Berdasarkan dari tinjauan pustaka tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang terdahulu secara komprehensif membahas gelar haji dalam status sosial, masyarakat Indonesia menganggap gelar haji tersebut suatu gelar yang istimewa dan orang yang bergelar haji ditempatkan pada stratifikasi masyarakat yang tinggi.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang digunakan penulis untuk mengumpulkan informasi dan data ketika melakukan penelitian, berikut metode-metode yang akan digunakan mulai dari jenis dan pendekatan penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan teknik analisis data.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengambil data yang ada di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis karena mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial terutama perubahan sosial.

¹³ Zukmawati, "*Makna Simbolik Haji*" (Studi pada Kelurahan Tonrorita Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa)" (Universitas Negeri Makassar, 2018) Hal. 3-7

Soerjono Soekanto mengartikan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang membatasi diri terhadap suatu penilaian, sosiologi tidak menerapkan arah sesuatu itu harus berkembang artinya memberi petunjuk-petunjuk kebijaksanaan masyarakat dalam proses kehidupan bersama. Sosiologi ini juga membahas tentang proses-proses sosial, mengingat bahwa pengetahuan perihal struktur masyarakat saja belum cukup untuk memperoleh gambaran yang nyata mengenai kehidupan bersama dari manusia.¹⁴ Penelitian ini bersifat deskriptif sehingga mendapatkan hasil berupa makna melalui proses analisis data induktif.

2. Sumber dan Jenis Data

Menurut Arikunto, sumber data yaitu dari mana asal data diperoleh. Data merupakan segala fakta, kata-kata, kalimat, simbol dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi.¹⁵ Terdapat dua macam sumber data yang digunakan penulis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Anggota DPRD Kabupaten Tegal berjumlah 49 anggota terbagi menjadi 9 fraksi partai politik. Sedangkan anggota DPRD yang sudah berhaji ada 14 anggota, dari partai nasionalis ada 12 anggota DPRD yang sudah melaksanakan ibadah haji, inilah yang menjadi sumber data primer pada penelitian. Data primer dalam penelitian ini berupa informasi hasil wawancara mengenai makna gelar haji bagi anggota DPRD partai nasionalis Kabupaten Tegal.

Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari wawancara pendukung di antaranya anggota DPRD partai nasionalis yang belum berhaji. Selain itu guna melengkapi sumber sekunder penulis menggunakan dokumen, buku, jurnal maupun artikel yang berkaitan dengan makna gelar haji.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Cet. XXXI Jakarta: Rajawali Pers 2001), hal. 21-22.

¹⁵ Hidayati Desy dan Irnita Rosaria Santy, "Analisis Bahasa Lisan dalam Pelayanan Surat Menyurat Kapal di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan K.S.O.P (Kelas 1) Banjarmasin," *Pena Jangkar* 1, no. 2 (2022) Hal. 9

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari sebuah penelitian yaitu untuk mendapatkan data makna gelar haji dan pentingnya gelar haji bagi masyarakat. Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data agar mendapatkan data yang valid dan terpercaya.

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi antara dua orang untuk mendapatkan informasi lebih dalam dari pihak yang di wawancarai.¹⁶ Wawancara menghimpun data primer. Data primer dilakukan kepada anggota DPRD partai nasionalis yang sudah berhaji sedangkan wawancara sumber pendukung dilakukan kepada anggota DPRD partai nasionalis yang belum haji. Peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam (In-depth interviewing) bertujuan agar dapat menyajikan konstruksi saat sekarang dalam satu konteks mengenai pribadi dan bentuk keterlibatan, wawancara mendalam dilakukan dengan terbuka, semi terstruktur dan tidak formal. Wawancara dilakukan secara offline di Kantor DPRD Kabupaten Tegal dan wawancara secara online via WhatsApp.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang berbentuk catatan penting terhadap kejadian yang sudah terjadi, bentuk dokumentasi dalam penelitian ini berupa catatan, foto, jurnal dan buku untuk memenuhi hasil penelitian yang ditargetkan untuk dicapai oleh peneliti, dalam melakukan dokumentasi penulis perlu memperhatikan keabsahan data dari apa yang dimuat di dalamnya.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013). Hal. 105.

4. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data bertujuan untuk memperoleh data yang akurat, maka peneliti perlu menguji keabsahan data dalam melakukan penelitian, Validitas data yang diperoleh dalam penelitian ini di uji menggunakan teknik triangulasi dalam pengujian kredibilitas penelitian. Teknik triangulasi ini ada dua macam yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode. Pada penelitian ini menggunakan triangulasi metode yaitu menggali data dengan metode yang berbeda,¹⁷ triangulasi metode pada penelitian ini yaitu menggali makna gelar haji bagi para anggota DPRD partai nasionalis Kabupaten Tegal dengan metode yang berbeda dengan menggunakan wawancara semi terstruktur.

5. Teknis Analisis Data

Data yang telah dihimpun sumber perlu ditelaah, dipelajari, dibaca dengan cermat dan direduksi. Data dirangkum dan disusun secara abstrak guna memudahkan penulis dalam memahami dan mengolah data. Penulis memilih teori Miles & Huberman sebagai pedoman dalam menganalisis data. Miles & Huberman menyatakan bahwa karakter dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif dan berlangsung secara terus menerus. Proses analisis dalam penelitian model ini dilakukan dengan empat tahap, yaitu:

1. Pengumpulan data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam lapangan yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami, sedangkan catatan refleksi adalah catatan yang berisi komentar, kesan pendapat dan tafsiran.

2. Mereduksi data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data guna memilih data yang relevan dan bermakna. Pada proses reduksi data hanya temuan data yang berkenaan dengan permasalahan penelitian

¹⁷ Sapto Haryoko, Bahartiar, Fajar Arwadi. “*Analisis Data Kualitatif*” (Konsep, Teknik dan Prosedur Analisi). (Makassar : Badan Penerbit UNM 2020). Hal. 398.

saja yang direduksi, dengan tujuan untuk menajamkan, menggolongkan dan mengarahkan sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan.

3. Penyajian Data

Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel. Tujuan sajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dalam hal ini, agar peneliti tidak kesulitan dalam penguasaan informasi baik secara keseluruhan atau bagianbagian tertentu dari hasil penelitian, maka peneliti harus membuat naratif, matrik atau grafik untuk memudahkan penguasaan informasi atau data tersebut.

Dengan demikian peneliti dapat tetap menguasai data dan tidak tenggelam dalam kesimpulan informasi yang dapat membosankan. Hal ini dilakukan karena data yang terpecah-pecah dan kurang tersusun dengan baik dapat mempengaruhi peneliti dalam bertindak secara ceroboh dan mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak mendasar. Untuk display data harus disadari sebagai bagian dalam analisis data.

4. Penarikan simpulan

Data yang telah direduksi, disajikan dan dilakukan verifikasi dipermudah dengan membuat simpulan sementara dan simpulan akhir.¹⁸

¹⁸ Sirajuddin Saleh, *“Analisis Data Kualitatif”*. (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017) Hal. 94-95.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan atau tatanan kerangka dalam mendesain skripsi memuat tiga bagian yang masing-masing memiliki isi yang berbeda, sebagai berikut:

1. Bagian pertama berisi judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembaham, halaman abstrak, kata pengantar dan daftar isi.
2. Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang permasalahan yang berisi argumen keterkaitan peneliti terhadap kajian ini, rumusan masalah. Tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka berisi penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bagian ini menjelaskan tentang kajian teori yang digunakan sebagai gambaran tata pikir penelitian tentang konsep-konsep teori yang akan digunakan dalam menjawab permasalahan sebagai rujukan penelitian. Landasan teori berisi tentang makna gelar haji, DPRD partai Nasionalis dan hubungan makna gelar haji dengan sistem kepartaian,

BAB III : PROFIL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN TEGAL

Bagian ini berisi profil dan data anggota DPRD partai nasionalis yang sudah berhaji.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN MAKNA GELAR HAJI BAGI ANGGOTA DPRD PARTAI NASIONALIS KABUPATEN TEGAL

Bagian ini merupakan isi analisi tentang hasil penelitian yang dibagi menjadi tiga bagian yaitu, gelar haji anggota DPRD Kabupaten Tegal dalam kapasitas sebagai muslim, gelar haji dalam kapasitas sebagai

anggota DPRD Kabupaten Tegal dan gelar haji dalam kapasitas sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Tegal.

BAB V : PENUTUP

Bagian ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran sebagai acuan penelitian dan kata penutup.

- b. Bagian terakhir berisi lampiran-lampiran, dokumentasi, pertanyaan wawancara dan daftar riwayat hidup.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Gelar Haji

Sejarah haji di Indonesia memiliki fase yang panjang dan berliku-liku membuat menarik untuk dikaji, karena sejarah tersebut terjadi semasa pemerintahan Belanda yang tidak mengetahui bahwa ibadah haji merupakan kewajiban yang mesti dilaksanakan oleh umat Islam. Dari abad ke abad pelaksanaan haji oleh orang Indonesia mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Gelar haji di Indonesia sudah ada sejak zaman dahulu pada zaman penjajahan Belanda. Pada saat itu gelar haji untuk menandai orang yang sudah melaksanakan ibadah haji. Belanda tidak menginginkan orang Indonesia menjadi pintar karena pada zaman dahulu orang berhaji tidak hanya sekedar melaksanakan ibadah haji tetapi mereka di Arab sambil menimba ilmu agama di sana.

Perjalanan ibadah haji pada zaman dahulu membutuhkan waktu yang sangat lama karena pada zaman dahulu masih menggunakan transportasi tradisional menggunakan kapal laut. Belanda mendata orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji dan menggunakan peci, karena peci pada zaman dahulu menjadi identitas bahwa orang tersebut alim dan paham agama sehingga orang-orang Belanda mudah mendata ketika mereka akan menculik dan dieksekusi mati. Permasalahan haji terjadi pada masa penjajahan Belanda permasalahan yang memuncak terjadi pada abad ke-19. Pada saat itu jamaah haji melonjak sehingga pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakan tetapi dengan kebijakan tersebut malah membuat semakin meningkatnya jamaah haji.¹⁹

Pemerintah Belanda awalnya tidak berani mencampuri persoalan agama di Nusantara karena mereka tidak mengerti mengenai agama Islam dan khawatir jika harus mencampuri urusan agama dengan politik yang dapat menimbulkan gerakan protes dari orang Indonesia. Meskipun seperti

¹⁹ Sartono Kartodirodjo, "*Pemberontakan Petani Banten 1888*" (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1984). Hal. 216.

itu tetapi beberapa kebijakan yang mengatur ibadah haji sudah mulai sejak pemerintahan Raffles sampai lahirnya kebijakan pemerintah Belanda seperti urusan paspor yang sampai saat ini masih digunakan. Hal tersebut merupakan strategi pemerintah Belanda dengan tujuan politik tertentu dengan alasan keamanan jamaah haji.²⁰

Pemerintah Belanda dalam penjajahannya sangat mengurangi ruang gerak umat Islam di Indonesia pada setiap penyebaran agama terutama kegiatan berdakwah. Umat Islam sebelum berdakwah harus memperoleh persetujuan izin dari bagian pemerintahan Belanda. Belanda takut apabila nanti akan terjadi jalinan persaudaraan serta kesatuan dengan rakyat pribumi sehingga pada akhirnya akan menimbulkan pemberontakan. Karena hal tersebut yang menjadi alasan dibatasi segala hal yang berkaitan dengan agama. Pembatasan ini berlaku juga pada ibadah haji karena kebanyakan jamaah haji Indonesia ketika pulang kembali ke tanah air banyak membawa perubahan seperti mendirikan organisasi Islam hal ini menimbulkan ketakutan bagi Belanda sehingga pemerintah Belanda berupaya melakukan pemantauan dan mengontrol juga gerak dari ulama yang mewajibkan gelar haji pada nama depan orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah haji. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan pemerintahan Belanda Staatsblad tahun 1903.²¹

Tepatnya di Pulau Onrust dan Pulau Khayangan tepatnya di wilayah Kepulauan Seribu, pada era pemerintahan Belanda mendirikan tempat karantina jamaah haji. Pulau Onrust dan Pulau Khayangan dijadikan jalur utama untuk urusan perhajian dengan tujuan untuk menjaga kesehatan apabila ada dari jamaah haji yang dirasa berbahaya maka akan disuntik mati oleh pihak pemerintahan Belanda dengan alasan yang beragama. Alasan

²⁰ Karel A Steenbrink, "*Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke-1*". (Jakarta: PT Bulan Bintang 1984) Hal.235.

²¹ Berita Jatim.com, "Ternyata Gelar Haji Awalnya Diberikan oleh Belanda", http://m.beritajatim.com/politik_pemerintahan/295826/ternyata_gelar_haji_awalnya%09diberikan_oleh_belanda.html, diakses pada Hari Kamis, 12 Oktober 2023.

tersebut yang menyebabkan jamaah haji tidak akan kembali ke kampung halaman jika sudah dikarantina. Menurut sejarah, orang-orang yang ditangkap diasingkan dan dipenjarakan yaitu orang yang memiliki gelar haji. Namun itu yang menjadikan awal mula proses terbentuknya gelar haji untuk jamaah haji Indonesia.

Pada awalnya gelar haji ini pertama kali dibuat oleh pemerintahan Belanda pada masa penjajahannya. Pemberian gelar tersebut oleh bangsa Belanda dikarenakan ketakutannya terhadap semakin banyaknya orang Indonesia yang menentang Belanda saat itu sehingga terjadinya pemberontakan. Maka, pemerintah Belanda memberi tanda terhadap orang-orang tersebut dengan menambahkan huruf H didepan namanya agar memudahkannya dalam mencari orang tersebut.

Tradisi penyematan gelar haji tidak hanya menjadi adat orang Indonesia saja, tetapi masyarakat Islam di Malaysia, Brunei juga turut menggunakan gelar haji tersebut. Menurut Dadi Darmadi seorang antropologi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta menjelaskan bahwa tradisi penyematan gelar haji ditinjau dari 3 perspektif yaitu keagamaan, kultural dan kolonial.

Perspektif keagamaan haji merupakan perjalanan yang menempuh waktu yang lama bahkan zaman dahulu memakan waktu yang berbulan-bulan menuju Mekkah. Haji membutuhkan finansial yang cukup banyak untuk biaya perjalanan, biaya hidup saat beribadah, biaya untuk keluarga yang ditinggalkan dan biaya lainnya. Kesehatan jamaah haji juga menjadi prioritas baik sebelum pemberangkatan sampai kembali ke tanah air, sehingga gelar haji layak disematkan bagi orang yang mampu menyelesaikan rangkaian ibadah haji.

Perspektif kultural haji dapat menjadi narasi yang menarik karena ekspedisi ibadah haji membawa rasa yang mengharukan dari mulai pemberangkatan jamaah haji sampai tibanya jamaah haji di Tanah air, Ibadah haji merupakan ibadah yang menjadi umat Islam dan gelar haji di Indonesia mempunyai nilai dan status sosial yang tinggi.

Perspektif kolonial haji merupakan pendapat yang paling populer dan di yakini bahwa yang memopulerkan gelar haji yaitu pemerintahan kolonial Belanda sejak 1916.²²

Di Indonesia masyarakat menganggap bahwa gelar haji menjadi tanda bahwa orang tersebut telah sempurna dalam ilmu agama dan mampu dalam segi ekonominya. Masyarakat sekitar menganggap masyarakat yang telah menunaikan haji sebagai orang yang kaya, dan juga sebagai panutan dalam segala hal terutama dalam agama. Masyarakat sekitar mempercayai para haji untuk menjadi pemimpin dalam shalat maupun pengajian. Dalam dunia politik khususnya di lembaga legislatif makna haji dapat dibedakan menjadi tiga yaitu.

Pertama, makna gelar haji dalam bentuk identitas muslim, gelar haji menjadi simbol kesalehan seseorang dalam agamanya dan menjadi simbol bahwa orang yang berhaji dianggap orang yang mampu dan berada. Simbol identitas muslim terekspresikan melalui kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan seperti rajin beribadah di Masjid, menjadi imam sholat, menjadi pemimpin pengajian di masyarakat dan slalu aktif dalam kegiatan masyarakat baik sosial maupun keagamaan.

Kedua, makna gelar haji dalam bentuk status sosial yaitu masyarakat yang memiliki gelar haji dipandang sebagai orang kaya sehingga dapat menaikkan status sosial dalam masyarakat. Tetapi tidak semua masyarakat yang telah melaksanakan ibadah bergaya hidup mewah, namun tetap saja berada pada golongan yang tinggi dalam masyarakat. Masyarakat lebih menghormati masyarakat yang telah menunaikan ibadah haji sehingga perilaku masyarakat sekitar lebih menyanjung, percaya dan mengutamakan masyarakat yang telah berhaji. Misalnya dalam suatu acara sosial maupun keagamaan masyarakat yang berstatus haji ini mendapat kehormatan untuk selalu menempati tempat duduk terdepan.

²² Andrean W. Finaka. <https://indonesiabaik.id/infografis/sejarah-gelar-haji-yang-hanya-ada-di-indonesia> diakses pada Hari Jum'at, 3 November 2023.

Bilamana dalam sebuah lingkungan masyarakat mempunyai seperangkat nilai yang dianggap sebuah kebanggaan dan penghargaan tersendiri maka mereka bersaing untuk meraihnya. Ketika seperangkat nilai tersebut dapat dicapai mereka tetap berpikir bagaimana status tersebut dapat ditingkatkan. Dengan status sosial beserta simbol-simbolnya, seseorang akan mendapatkan pengakuan dan posisi dalam struktur sosial. Posisi ini akan terikat erat dengan penghargaan dan penerimaan masyarakat.

Ketiga, makna gelar haji dalam pencalonan legislatif merupakan pencantuman gelar dalam kampanye baik di poster, baliho maupun dibaju menjadi daya tarik fisik kandidat dalam pemilihan umum untuk mempengaruhi persuasi masyarakat sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa representasi diri kandidat sangat penting dengan tujuan persuasi dari kampanye. Beberapa analisa aspek yang ada pada alat peraga kampanye kandidat calon legislatif dinilai penting untuk diperhatikan yaitu nama calon legislatif, partai, jargon, *gestur* dan pose foto.

B. Haji dalam politik dan sosiologi

Secara politik, melaksanakan haji dapat dilihat sebagai sarana legitimasi politik. Hal ini dapat dilihat dari sejarah Banten pada masa kerajaan, di mana pada saat itu banyak raja-raja yang melakukan haji dengan tujuan mendapatkan pendukung. Bahkan kemudian, tempat suci dengan cepat mulai berkembang dan sejumlah besar pejabat elit pemerintah mulai berhaji. Dampak sosial, khususnya bagaimana jamaah mampu menerapkan pelajaran dan pesan yang terkandung dalam pelaksanaan ibadah haji ke dalam konteks kehidupan sehari-hari di masyarakat.²³ Sedangkan secara sosiologis, ibadah haji tercipta dalam perilaku dan interaksi dengan masyarakat umum agar menjadi panutan atau mendapat pujian. Umat Islam dari seluruh dunia yang dapat melakukan perjalanan ke Mekkah setiap tahun untuk melakukan berbagai ibadah antara lain:

²³ Bela Fitri Wulandari, Gelar Haji Sebagai Stratifikasi Sosial Pada Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, Vol. (2023). Hal. 12.

a. Rukun Haji

1. Ihram yaitu niat mengerjakan ibadah haji maupun umrah, ihram wajib dimulai dari miqatnya baik miqat zamani maupun miqat makani. Adapun sunah-sunah sebelum melaksanakan miqat yaitu mandi, menggunakan wewangian, mencukur kumis dan memotong kuku.
2. Wukuf dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah pada waktu dhuhur, setiap jamaah yang melaksanakan ibadah haji wajib berada di Padang Arafah karena wukuf merupakan rukun yang terpenting dalam pelaksanaan ibadah haji. Saat di Arafah jamaah haji memperbanyak baca talbiyah doa dan dzikir dengan menghadap kiblat sambil mengangkat tangan. Hari Arafah memiliki fadhilah Dimana hari tersebut Allah SWT membebaskan hambanya dari siksa neraka dan mengabulkan doa hambanya yang dipanjatkan.²⁴
3. Tawaf Ifadah yaitu Tawaf Ifadah yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali dengan keadaan suci dari hadas maupun najis baik di badan maupun pakaian. menutup aurat. Saat mengelilingi Ka'bah berada disebelah kiri dimulai dan di akhiri di hajar aswad. Macam-macam tawaf terbagi menjadi lima yaitu :
 - a. Thawaf qudum merupakan tawaf yang dilakukan ketika jamaah baru sampai Mekkah
 - b. Thawaf Ifadah merupakan thawaf yang menjadi rukun ibadah haji
 - c. Thawaf sunah merupakan thawaf yang dilakukan semata-mata mencari Ridha Allah SWT jika thawaf sunah ditinggal tidak masalah
 - d. Thawaf nazar merupakan thawaf yang dilaksanakan untuk memenuhi nazar atau janji

²⁴Abdul Sattar, Ali Murtadlo, Hasyim Hasanah dan Vina Darissurayaa, "*Implementasi Desain Manasik Haji Alternatif*", (Semarang: Fatawa Pubhlising 2021). Hal. 156

- e. Thawaf wada' merupakan thawaf yang dilaksanakan sebelum meninggalkan Kota Mekkah
4. Sa'I merupakan salah satu ibadah haji yang menjadi bagian dari pelaksanaan ritual ibadah haji dengan cara melakukan perjalanan dan lari-lari kecil sebanyak tujuh kali dari bukit Shafa ke bukit Marwah.²⁵
5. Tahalul adalah mencukur atau menggunting rambut paling sedikit tiga helai dan sebagai tanda bahwa semua dibebaskannya semua larangan dan pantangan saat berihram.
6. Tertib yaitu menjalankan rukun haji secara berurutan.

b. Wajib Haji

Wajib haji yaitu amalan dalam ibadah haji yang wajib dikerjakan. Wajib haji menentukan sahnya ibadah haji, jika ibadah haji tidak dikerjakan maka hajinya tetap dianggap sah tetapi jamaah haji dikenakan membayar dam (denda) yang telah ditentukan. Berikut beberapa wajib haji yaitu :

a. Ihram

Ihram yaitu niat sebelum melaksanakan ibadah haji, ihram dilakukan dari miqat makani dan zamani. Miqat makani yaitu batas atau garis berdasarkan batas tanah geografis tempat jamaah haji menggunakan pakaian ihram untuk melintas batas suci dan berniat untuk melaksanakan ibadah haji sedangkan miqat zamani yaitu batas waktu sahnya melaksanakan ritual ibadah haji.

b. Mabit di Muzdalifah

Bermalam di Muzdalifah dilakukan sesudah wukuf di padang arafah (setelah terbenamnya matahari) pada tanggal 9 Dzulhijjah. Di Muzdalifah jamaah haji melakukan jamal dan qashar sholat maghrib dan isya karena suatu perjalanan yang jauh.

²⁵Djaenab, "Sa'I Dalam Perspektif Hadist". *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 2 no. 2 (2016). Hal. 181.

Saat di Muzdalifah jamaah haji mengambil kerikil untuk lempar jumrah sebanyak 49 butir ataupun 70 butir.

c. Melempar jumrah aqabah

Pada tanggal 10 Dzulhijah jamaah haji melaksanakan jumrah aqabah di Mina sebanyak 7 butir kerikil setelah melempar jumrah aqabah jamaah haji melaksanakan tahalul.

d. Melempar jumrah ula wushta dan ‘aqabah

Pada tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijah jamaah haji melaksanakan jumrah jumrah ula wushta dan ‘aqabah di mulai setelah tergelincir matahari sampai terbenamnya matahari. Jika jamaah haji mengambil nafar awal maka hanya melaksanakan pada tanggal 11 dan 12. Sedangkan jamaah haji yang mengambil nafar tsani maka melaksanakan lempar jumrah pada tanggal 11, 12 dan 13.

e. Mabit di Mina

Pada tanggal 11-13 Dzulhijah ini lah yang diwajibkan bermalam di Mina. bagi yang nafar awal diperbolehkan hanya bermalam pada tanggal 11-12 saja.

f. Thawaf wada’

Thawaf wada’ dilakukan disaat akan meninggalkan Baitullah Makkah.²⁶

C. DPRD Partai Nasionalis

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi dimana pemilihan wakil rakyat dilaksanakan dengan pemilihan umum atau disebut pemilu. Pemilu merupakan hak warga negara secara mutlak dalam negara yang menganut demokrasi, pelaksanaan demokrasi di Indonesia berdasarkan pasal 18 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tertulis bahwa “Pemerintahan Daerah Provinsi,

²⁶ Muhammad Noor, Haji dan Umrah. *Jurnal Humaniora dan Teknologi*. Vol 4, No 1. (2018). Hal. 41.

Daerah Kabupaten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”.²⁷

Partai politik adalah kelompok terorganisasi yang anggotanya memiliki kesamaan dalam nilai-nilai, orientasi, cita-cita serta tujuan. Tujuan dalam hal ini yaitu guna mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional agar dapat melakukan kebijakan umum. Partai politik dalam prinsip dasarnya memiliki fungsi yakni: *Pertama*, Parpol merupakan suatu koalisi, yang mengandung pengertian bahwa parpol dibentuk dari bermacam-macam kepentingan guna menyatukan kekuatan. *Kedua*, parpol merupakan suatu organisasi yang mengandung arti bahwa untuk dapat mempertahankan eksistensi, mampu dinamis serta berkelanjutan parpol harus di manajemen dengan baik. Oleh sebab itu, perlu adanya pembinaan agar mampu menarik dan mewartakan perjuangan, serta dapat merepresentasi calon yang diusung saat pemilu. *Ketiga*, parpol sebagai pembuat kebijakan, artinya bahwa parpol mendukung para calon yang mereka ajukan untuk menduduki jabatan-jabatan publik. Berdasarkan hal tersebut, parpol memiliki kekuasaan untuk menentukan kebijakan dalam lingkup kekuasaannya.

Kedudukan hukum DPRD pada era reformasi telah mengalami proses reposisi yang cukup radikal. Di era orde baru kedudukan DPRD yaitu sebagai salah satu unsur dari pemerintahan daerah yang artinya DPRD diposisikan sebagai mitra Kepala Daerah dalam perumusan dan implementasikan kebijakan daerah. DPRD juga diberikan hak untuk meminta pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah, sesuatu itu tidak terjadi dalam masa orde baru.²⁸

Partai politik pertama lahir di negara-negara Eropa Barat, dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan dan di ikutsertakan dalam proses politik. Di Indonesia,

²⁷Mintarti Indartini, Nurharibu Wibiasono dan Assistriadi Widjisen, "*Peran dan Fungsi DPRD dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah*", (Solo: Penerbit Taujih. 2019) Hal. 18.

²⁸ Mintarti Indartini, Nurharibu Wibiasono dan Assistriadi Widjisen, "*Peran dan Fungsi DPRD dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah*", (Solo: Penerbit Taujih. 2019) Hal. 18.

kemunculan partai-partai politik terciptanya karena iklim kebebasan yang luas bagi masyarakat pasca-runtuhnya pemerintahan kolonial Belanda. Kebebasan tersebut memberikan ruang dan kesempatan kepada masyarakat untuk membentuk organisasi, termasuk partai politik. Selain didorong oleh adanya iklim demokrasi yang diberikan oleh pemerintah kolonial Belanda, adanya partai-partai politik di Indonesia juga tidak lepas dari karakteristik masyarakat Indonesia yang majemuk.²⁹ Menurut Budiardjo bahwa fungsi partai politik terbagi menjadi empat yaitu, sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, rekrutmen politik dan pengatur politik.³⁰

Indonesia merupakan negara demokrasi dengan adanya partai politik demokrasi dianggap sebagai sistem politik yang memungkinkan adanya praktik politik secara bebas dan adil. Kehadiran partai politik dalam negara yang berdemokrasi tidak lepas dari ideologi yang dianut. Berikut ideologi partai politik di Indonesia beserta partai-partainya:

a. Ideologi Nasionalis

Nasionalis memiliki arti sempit yaitu perasaan kebangsaan atau cinta tanah air yang sangat tinggi. Nasionalis dalam arti yang luas yaitu perasaan cinta dan bangga terhadap tanah air tanpa memandang rendah bangsa lain. Sedangkan ideologi nasionalis yaitu paham yang mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan melahirkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia yang mempunyai tujuan sama demi kepentingan nasional.

Para nasionalis beranggapan bahwa sebuah negara bersumber dari rakyat kehendak rakyat. Ideologi nasional menjadi ideologi paling modern karena tujuan akhir pencapaian politiknya adalah menghasilkan sistem negara sebagai entitas politik yang kuat di tengah lingkungan manusia di dunia. Berikut partai politik di Indonesia yang berideologi nasionalis antara lain, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai

²⁹Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015) Hal 1-2.

³⁰Miriam Budiardjo, Jimly Asshidiqies, "Parpol dan Pemilu sebagai Instrumen Demokrasi, *Jurnal Konstitusi* Vol. 3 no. 4 (2006) Hal. 41.

Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Partai Golongan Karya (Golkar), Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Partai nasionalis dibagi menjadi dua macam yaitu

1. Partai nasionalis sekuler yaitu PDIP. Basis pemilih partai tersebut berbasis abangan walaupun dari PDIP berusaha mengajak pemilih dari kalangan santri dengan membuat wadah perkumpulan pemilih islam seperti Jamaah muslim (Jamus) dan Baitul Muslimin (Bamus) tetapi upaya ini tidak mendapatkan hasil yang baik karena para santri mempunyai hambatan untuk bergabung atau memilih PDIP dengan notabene banyak dari kalangan abangan.
2. Partai nasionalis religius yaitu seperti Partai PKB, Partai PAN, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Indonesia Baru dan Partai Buruh Sosial Nasional. Bagi partai yang bergaris nasionalis religius segmen pemilihnya banyak dari semua elemen, Baik dari santri, abangan maupun yang beragama lain.

b. Ideologi Islami

Ideologi Islami yaitu paham yang berkeyakinan bahwa Islam harus menjadi pedoman bagi segala kehidupan manusia baik secara sosial, ekonomi, budaya serta kehidupan pribadi. Ideologi Islami di Indonesia dapat di definisikan sebagai bentuk identitas politik dan dukungan terhadap identitas muslim. Berikut partai politik di Indonesia yang berideologi Islamis yaitu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai Persatuan Pembangunan (PPP).³¹ Keberadaan partai berideologi Islami tidak terlepas dari orientasi para elite partai tersebut untuk menjadikan islam sebagai landasan eksplanasi, diferensiasi dan evaluasi atas kerja

³¹ Monica Ayu Caesar Isabela, *Ideologi Partai Politik di Indonesia : Nasionalis dan Islamis*, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/11/03000001/ideologi-partai-politik-di-indonesia-nasionalis-dan-islamisl>, diakses pada Hari Senin, 22 Mei 2023.

partai sebagaimana fungsi ideologi pada umumnya. Menurut Terence Ball dan Richard Dagger ideologi mempunyai empat fungsi yang saling berkesinambungan yaitu sebagai penjelas, sebagai pijakan pola sikap atau orientasi, sebagai pijakan pola orientasi, sebagai media atau alat evaluasi dan sebagai aktualisasi program. Dalam konteks partai Islami seluruh agenda dan peran yang dijalankan harus merujuk atas yang dianutnya. Partai Islami yang sekarang memiliki kursi di Senayan dan mendaftarkan di KPU tidak mencerminkan partai islam bahkan beberapa politisi tidak sesuai dengan syari'at islam. Partai Islami yang sekarang memiliki ciri-ciri yaitu: *Pertama*, Partai yang berkuasa lebih bercorak sekuler dan kebangsaan, konsekuensinya aturan yang diterapkan menggunakan sisa aturan peninggalan Belanda. *Kedua*, Partai islam yang ada tidak memiliki konsepsi yang jelas dan tegas. Contohnya dalam menyikapi fenomena kepada negara perempuan dalam fikih islam dan menunjukkan bahwa tidak ada bedanya dengan partai nasionalis. *Ketiga*, Partai-partai secara umum hanya dengan tujuan kemenangan pemilu. *Keempat*, tidak menjalankan metode dengan jelas untuk melakukan perubahan di masyarakat. Namun jalanya dengan berkoalisi partai nasionalis. *Kelima*, tidak adanya ikatan yang kuat di antara para anggotanya. Ikatan yang ada lebih pada kepentingan. Muncullah perpecahan di dalam tubuh partai-partai Islam atau berbasis massa umat Islam. *Keenam*, perilaku sebagian anggota partai tidak mencerminkan asas keislaman sesungguhnya.³²

³² Sudarno Shobron, Prospek Partai Islam Ideologis di Indonesia. *Jurnal studi islam*, Vol 14, no. 1 (2013) Hal. 13-14.

D. Hubungan Makna Gelar Haji dengan Posisi Kepartaian

Setiap orang memaknai ibadah haji berbeda-beda sesuai dengan tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh orang tersebut. Salah satunya dalam dunia politik yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dalam ideologi kepartaian dibagi menjadi dua yaitu ideologi nasionalis dan ideologi islami. Setiap ideologi memiliki dasar dan prinsip yang berbeda salah satunya dalam memandang ibadah haji dan gelar haji.

Orang yang berasal dari partai ideologi nasionalis menganggap haji sebagai ibadah penyempurnaan rukun Islam yang kelima dan menggugurkan kewajiban sebagai umat Islam yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Anggota dewan yang berasal dari Partai Nasionalis mengetahui ibadah haji hanya sebagai ritual yang dilaksanakan pada bulan haji sedangkan pada saat pelaksanaannya hanya mengikuti sesuai materi yang disampaikan saat manasik sebelum keberangkatan dan materi yang disampaikan oleh pembimbing. Sedangkan orang yang berasal dari partai ideologi Islami menganggap haji tidak hanya sekedar ritual tetapi menjadi seluruh bagian aspek kehidupan seperti ideologi politik. Partai yang berideologi Islami tidak hanya turun dengan persoalan politik yang dikenal dengan menjadi wakil rakyat namun memiliki kepentingan di Indonesia dengan memperjuangkan Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mengarahkan nilai ajaran Islam sebagai kekuatan dalam proses membangun umat dan bangsa.³³

Salah satu partai yang berideologi Islami dalam logo kepartaiannya menggunakan simbol ka'bah. Ka'bah memiliki makna simbol pemersatu umat islam, ka'bah bagi partai PPP merupakan simbol kesatuan arah perjuangan umat islam di Indonesia dalam rangka beribadah kepada sang pencipta serta menjadi sumber motivasi dan inspirasi untuk menegakan ajaran islam dalam kehidupan. Lambang PPP yaitu gambar Ka'bah yang

³³ Muhammad Maulidan, Pengaruh PKS (Partai Keadilan Sejahtera) sebagai partai Islam dalam dukungan Indonesia terhadap Palestina di Era Jokowi. (Universitas Islam Indonesia 2022) Hal. 24.

dipandang dari arah depan pintu masuk, bertirai warna kuning emas, dan tampak di sisi kiri Hajar Aswad yang berada di sudut dinding tepat. Di bawah gambar Ka'bah bertuliskan PPP berwarna kuning emas yaitu singkatan nama Partai Persatuan Pembangunan. Tulisan PPP berada di atas warna dasar hijau dalam bingkai segi 4 (empat) sama sisi berwarna kuning emas.

BAB III
PROFIL ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(DPRD) KABUPATEN TEGAL

A. Gambaran Umum Anggota DPRD Partai Nasionalis

1. Profil anggota DPRD Kabupaten Tegal

Sejarah awal mula keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tegal, dimulai pada era tahun 1995. Pada saat itu pemilihan Umum (Pemilu) pertama kali diselenggarakan pada masa pemerintahan orde lama dengan sejumlah partai politik yang ikut pemilu pada saat itu didominasi oleh partai politik bergaris nasionalis dan agamis.

Kabupaten Tegal membagi menjadi enam Daerah Pemilihan Pemilihan (Dapil) dengan rincian, Dapil I meliputi Kecamatan Slawi, Kecamatan Dukuhwaru dan Kecamatan Lebaksiu. Dapil II meliputi Kecamatan Pangkah, Kecamatan Kecamatan Kedungbanteng dan Kecamatan Tarub. Dapil III meliputi Kecamatan Jatinegara, Kecamatan Bojong dan Kecamatan Bumijawa. Dapil IV meliputi Kecamatan Balapulang, Kecamatan Pagerbarang dan Kecamatan Margasari. Dapil V meliputi Kecamatan Adiwerna, Kecamatan Dukuhturi dan Kecamatan Talang. Dan terakhir Dapil VI meliputi wilayah Kecamatan Kramat, Kecamatan Suradadi dan Kecamatan Warureja.³⁴ Anggota DPRD Kabupaten Tegal tahun 2019-2024 berjumlah 49 anggota, berawal dari 50 anggota tetapi pada tahun 2021 Ketua DPRD meninggal dunia yaitu Alm. Bapak H. Agus Salim. Dari 49 Anggota tersebut terbagi 9 dari fraksi partai politik yaitu:

³⁴ Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal, <https://dprd-tegalkab.go.id/sejarah-dprd/> diakses pada Hari Minggu 24 September 2023.

Tabel 3. 1

Daftar Nama Anggota DPRD Kabupaten Tegal

No	Nama	Fraksi
1.	A. Ja'far	PKB
2.	Umi Azkiyani	PKB
3.	Khujatul Islam	PKB
4.	Mohammad Faiq	PKB
5.	Didi Permana	PKB
6.	Miftachudin	PKB
7.	Wasbun Jauhari	PKB
8.	Ahmad Fatikhudin	PKB
9.	Catur Buana Zambika	PKB
10.	Nofiyatul Faroh	PKB
11.	Sayid Abdul Qodir	PKB
12.	Munif	PKB
13.	Mu'min	PKB
14.	Akhmad Sayuti	Gerindra
15.	Ninik Budiarti	Gerindra
16.	Hamid	Gerindra
17.	Rudi Indrayanti	Gerindra
18.	Ade Krisna Mulyati	Gerindra
19.	Abu Su'ud	Gerindra
20.	Rizqo Wildan Aguilnaldo	Gerindra
21.	Samsuri B.H Nuryadi	Gerindra
22.	Memet Said	PDI-P
23.	Agung Yudhi Kurniawan	PDI-P
24.	Nursidik	PDI-P
25.	Lina Agustina	PDI-P
26.	Ragil Tresno Setyaningrum	PDI-P
27.	Rita Iryanti	PDI-P
28.	Nur Kholifah	PDI-P
29.	Bambang Romdhon Irawanto	PDI-P
30.	Rosmalia Yuniar	PDI-P
31.	Sugono	PDI-P
32.	Erni	PDI-P
33.	Muhammad Khuzaeni	Golkar
34.	Adhitya Zulton Prakosa	Golkar
35.	Saminah	Golkar
36.	Muhammad Bintang Adi Prajamukti	Golkar
37.	Nuridin	Golkar
38.	Agung Solichin	Golkar
39.	Moh. Irfan	NasDem
40.	Arip Budiono	PKS

41.	Bakhrun	PKS
42.	Khikmah Riwayati	Perindo
43.	Khaeru Sholeh	PPP
44.	Naufal Sholeh	PPP
45.	Nurfasikha	PPP
46.	Samsul Huda	PAN
47.	Khamami	Hanura
48.	Oriega Ayudya	Demokrat
49.	Sriyanto	Demokrat

Dari seluruh anggota DPRD yang sudah melaksanakan ibadah haji ada 14 orang sedangkan dari anggota DPRD partai nasionalis yang sudah melaksanakan ibadah haji ada 12 anggota yaitu:

Tabel 3. 2

Anggota DPRD Partai Nasionalis yang Sudah Melaksanakan Haji

No.	Nama	Fraksi
1.	Miftachudin	PKB
2.	Wasbun Jauhari	PKB
3.	Nofiyatul Faroh	PKB
4.	Sayid Abdul Qodir	PKB
5.	Mu'min	PKB
6.	Samsuri B.H Nuryadi	Gerindra
7.	Lina Agustina	PDI-P
8.	Nurkholifah	PDI-P
9.	Erni	PDI-P
10.	Samsul Huda	PAN
11.	Agus Solichin	Golkar
12.	Khamami	HANURA

2. Visi dan Misi DPRD Kabupaten Tegal

Visi DPRD Kabupaten Tegal

Terwujudnya tata kelola sekretariat DPRD yang efektif, efisien dan berbudaya dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas

Misi DPRD Kabupaten Tegal

- a. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur sekretariat DPRD melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan secara internal dan eksternal
- b. Mendukung terciptanya hubungan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif

- c. Menumbuhkembangkan semangat kebersamaan, rasa memiliki dan tanggung jawab yang tinggi terhadap tugas yang diemban
- d. Meningkatkan pelayanan secara profesional kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD serta segenap komponen masyarakat

3. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD

Tugas dan Fungsi sekretariat DPRD Kabupaten Tegal diatur dalam peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi dan fungsi serta tata kerja sekretariat daerah dan sekretariat DPRD Kabupaten Tegal serta staf ahli Bupati.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan fungsi dari Sekretariat DPRD yaitu :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD
- d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD
- e. Pengelolaan urusan ketatausahaan DPRD

4. Struktur organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 71 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi dan fungsi serta tata kerja sekretariat daerah dan sekretariat DPRD Kabupaten Tegal serta staf ahli Bupati, susunan organisasi sekretariat DPRD ditetapkan sebagai berikut:

- a. Sekretaris DPRD
- b. Bagian persidangan dan perundang-undangan, terdiri dari tiga sub bagian, yaitu :
 - 1. Subbagian persidangan dan Risalah
 - 2. Subbagian produk dan dokumentasi hukum

3. Subbagian humas dan protokol
- c. Bagian fasilitasi penganggaran, pengawasan dan kerja sama, terdiri dari dua subbagian yaitu :
 1. Subbagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan
 2. Subbagian fasilitasi kerja sama dan aspirasi
- d. Bagian program dan keuangan terdiri dari dua subbagian yaitu :
 1. Bagian perencanaan
 2. Subbagian perbendaharaan dan akuntansi
- e. Bagian umum, terdiri dari tiga subbagian yaitu :
 1. Subbagian tata usaha dan kepegawaian
 2. Subbagian perlengkapan
 3. Subbagian rumah tangga³⁵

5. Lokasi kantor DPRD Kabupaten Tegal

Kabupaten Tegal adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibu kotanya adalah Slawi, sekitar 14 km sebelah selatan Kota Tegal. Kabupaten ini berbatasan dengan Kota Tegal dan Laut Jawa di utara, Kabupaten Pemalang di timur. Kabupaten Banyumas di selatan, serta Kabupaten Brebes di selatan dan barat. Kabupaten Tegal terdiri atas 18 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Slawi, termasuk kantor DPRD Kabupaten Tegal berada di Jl. Soetomo No. 1. Slawi Tegal.

6. Latar Belakang Pekerjaan Anggota DPRD Sebelum Menjadi Anggota DPRD

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota DPRD Partai nasionalis yang sudah berhaji, peneliti mendapatkan hasil penelitian latar belakang pekerjaan anggota DPRD partai nasionalis yang sudah berhaji bermacam-macam antara lain seperti guru, pengusaha konveksi,

³⁵ Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal, <https://dprd-tegalkab.go.id/visi-dan-misi/> diakses pada Hari Minggu, 24 September 2023.

seniman, kontraktor, pengusaha Pertamina dan lain sebagainya.³⁶ Latar belakang pekerjaan sebelum menjadi anggota legislatif mendukung jawaban para anggota DPRD Partai Nasionalis yang sudah berhaji terkait makna gelar haji anggota DPRD Partai Nasionalis Kabupaten Tegal.

B. Rangkaian pelaksanaan ibadah haji di Kabupaten Tegal

Jamaah haji dari Kabupaten Tegal tergolong masih minoritas, biasanya dalam satu desa belum tentu setiap tahunnya berangkat haji. Warga Kabupaten Tegal sebelum melaksanakan ibadah haji biasanya melaksanakan walimatul ursy. Walimatul ursy merupakan bentuk tanda pamitan antara calon jamaah haji dengan warga dilingkungan sekitar sekaligus menitip keluarga yang ditinggalkan dirumah selama ibadah haji. Biasanya selama jamaah haji melaksanakan ibadah di tanah suci anggota keluarga dirumah melaksanakan doa bersama dengan tujuan agar anggota keluarga yang berangkat haji diberikan keselamatan dan kelancaran selama beribadah. Saat hari keberangkatan keluarga dan warga sekitar turut mengantar sampai di pendopo pemerintah daerah Kabupaten Tegal.

C. Kondisi Keagamaan anggota DPRD Partai Nasionalis Kabupaten Tegal

Seluruh anggota DPRD Kabupaten Tegal tidak semuanya beragama Islam, tetapi mayoritas dari mereka beragama Islam. Beberapa anggota DPRD dari partai nasionalis yang telah berangkat haji menggunakan visa furada dan haji plus ada juga yang menjadi petugas haji. Tahun keberangkatan haji dilaksanakan sebelum pemilihan legislatif tahun 2019. Berikut data tahun keberangkatan anggota DPRD partai nasionalis yang telah melaksanakan ibadah haji.

³⁶ Wawancara dengan Bapak Agung Yudhi Kurinawan pada 16 Oktober 2023 Pukul 13. 24 WIB

Tabel 3. 3

Tahun Keberangkatan Haji Anggota DPRD Partai Nasionalis

No	Nama Anggota	Tahun Haji
1.	Erni	2015
2.	Samsuri B.H Nuryadi	2018
3.	Lina Agustina	2012
4.	Sayid Abdul Qodir	2019
5.	Wasbun Jauhari	2017
6.	Miftachudin	2018
7.	Agus Solichin	2015
8.	Nofiyatul Faroh	2016
9.	Nurkholifah	2019
10.	Samsul Huda	-
11.	Khamami	-
12.	Mu'min	-

Ibadah haji merupakan perjalanan menuju Allah maka Allah memerintahkan agar jamaah haji berbekal diri, agar semua aktivitas yang dilakukan sebelum berangkat, selama dalam manasik, dan perjalanan pulang, bahkan semua hidupnya sebagai ibadah kepada Allah. Bekal itu meliputi ilmu tentang fiqih safar, dan fiqih haji, terutama falsafat atau ruh haji, bekal biaya perjalanan yang halal yang tidak tercampur sedikitpun dengan syubhat. Bekal doa dari orang-orang sholeh di lingkungan tempat tinggal dan teman yang sholeh. Begitu juga anggota DPRD partai nasionalis yang sudah melaksanakan ibadah haji tentunya bekal dalam beribadah haji setiap anggota berbeda-beda, sebagaimana di ungkapkan oleh Bapak H. Miftachudin

“2018 saya berangkat haji sebelum pileg 2019 itu saya berangkat bersama ibu dan istrinya, jujur saja nggih mba saya bukan orang yang paham agama tetapi saya alhamdulillah sekali selama pelaksanaan ibadah haji slalu diberi jalan yang gampang, contoh saja saat di Madinah saya niat harus sholat di depan eh pada saat saya balik ke hotel teman-teman jamaah lain geger katanya ngantri di raudhoh lama sekali, seketika itu saya tanya “raudhah kue neng ndi? Trus teman saya menjawab “masjid nabawi bagian ngarep” ternyata saya tadi barusan di raudhah ya”³⁷

³⁷ Wawancara dengan Bapak Miftachudin pada 16 Oktober 2023 Pukul 14. 12 WIB

Sebelum ingin melaksanakan ibadah haji sebaiknya mengetahui makna-makna ibadah haji dan tata cara pengerjaannya. Oleh sebab itu dikenalkan oleh Rasulullah SAW dengan manasik haji. Dengan demikian bimbingan manasik haji menjadi bekal calon jamaah haji agar dapat menunaikan haji dengan sempurna dan menjadi haji yang mabrur. Bagi sebagian anggota DPRD partai nasionalis merasa awam dengan ritual ibadah haji karena sebagian dari mereka hanya mengetahui bahwa haji itu rukun Islam yang kelima dan puncak haji yaitu wukuf di Arafah, karena ilmu agama yang mereka miliki tidak begitu jauh. Anggota DPRD yang sudah melaksanakan ibadah haji mengaku bahwa saat menjelang keberangkatan ibadah haji belum mampu menghafal dan memahami do'a do'a haji, belum mampu membaca ayat al-Qur'an dengan baik dan benar serta ajaran agama Islam lainnya. Realita tersebut ditemukan pada saat pelaksanaan manasik haji. mereka membutuhkan panduan do'a-do'a yang disertai teks latin.³⁸

Perasaan kurangnya pemahaman ilmu agama senantiasa terbayang di pikiran jamaah haji, mereka merasa bingung menghadapi perjalanan haji secara fisik dan praktek ritual tertentu, dengan keharusan menghafal do'a-do'a yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan ritual ibadah haji. Dalam wawacaranya Ibu Hj. Erni mengatakan :

“Saya dulu kuliahnya D3 pariwisata, saya punya cita-cita pengen punya hotel tapi saat ini belum tercapai walaupun saya hampir setiap kerja diluar kota slalu nginep dihotel tapi alhamdulillah ya saya punya hotel kecil-kecilan aliasa kost di daerah dekat kampus unpam. Basic dari kecil saya itu seni kebetulan keluarga saya keluarga yang kental dengan kesenian jadi pengetahuan agama saya itu cukup terbatas mba, bacaan al-Quran saya pun masih harus banyak belajar jadi selama perjalanan ibadah haji saya terbantu dengan pemandu haji itu sama buku doa yang dikasih pemandu.”³⁹

Hal yang sama juga dikatakan oleh anggota DPRD lain bahwa mereka tidak berlatar belakang pendidikan agama, tetapi keterbatasan

³⁸ Wawancara dengan Ibu Hj. Lina Agustina pada 15 Desember 2023 Pukul 21.03

³⁹ Wawancara dengan Ibu Hj. Erni pada 16 Oktober 2023 Pukul 13. 23 WIB

mereka dalam ilmu agama tidak mematahkan semangat dalam haji. Zaman semakin canggih jadi teknologi seperti HP dapat membantu jamaah ketika merasa kebingungan selama di Mekkah maupun Madinah.

Secara individu ibadah haji menjadi suatu pengalaman religius yaitu pengalaman yang bersifat keagamaan berupa hubungan atau ikatan yang mengatur manusia dengan Tuhannya. Ada salah satu anggota DPRD yang memiliki pengalaman religius yang unik, sebagaimana diceritakan Bapak H. Miftachudin dalam wawancaranya :

“Dulu pas saya sholat di depan ka’bah waktu itu saya lagi sujud, nah pas saya mau naik berdiri ternyata diatas saya itu ada ibu-ibu yang menutupi saya jadi sekitar setengah jam saya sujud disitu lama sekali, eh setelah pulang dirumah tiba-tiba followers tiktok saya naik drastis tapi yaitu mba yang ngikutin ibu-ibu semua, saya juga heran”.⁴⁰

Pengalaman religius menjadikan pengalaman yang tak terlupakan dan mendatangkan rasa rindu ingin selalu kembali ke Baitullah. Berkumpul dengan umat Muslim dari berbagai negara adalah salah satu pengalaman menarik yang hanya bisa ditemukan saat melakukan umrah dan haji. Di tempat-tempat suci seperti Makkah dan Madinah, jamaah berasal dari berbagai belahan dunia dengan budaya, bahasa, dan latar belakang yang berbeda-beda. Namun, mereka semua bersatu dalam tujuan yang sama, yaitu mendapatkan keridhaan Allah dan mendapatkan kemabruran dalam ibadah haji. Menurut Ibu Hj, Nofiyatul Faroh menuturkan dalam wawancaranya :

“Kalo pengalaman pribadi saya dalam hal religius ibadah haji umrah itu banyak, kebetulan saya punya biro haji umrah namanya “PT Perjalanan Para Khalifah Bojong” jadi biasanya ketika jamaah berangkat itu saya ikut mendampingi atau menjadi petugas haji terutama jamaah ibu-ibu, disitulah pengalaman religius muncul ketika saya menghadapi jamaah ibu-ibu lansia, seperti slalu sigap melayani jamaah lansia, dorong kursi roda pada saat sa’I atau ibadah lainnya. Tapi disitu saya ngga merasa bebas mba, jadi disitu jiwa kemanusiaan bergerak ya yang penting manfaat dunia wal akhirat mba”.⁴¹

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Miftachudin pada 16 Oktober 2023 Pukul 14. 12 WIB

⁴¹ Wawancara dengan Ibu HJ. Nofiyatul Faroh pada 16 Desember Pukul 08.41 WIB.

Menjadi pendamping atau petugas haji menjadi salah satu pengalaman religius yang bersifat kemanusiaan, berbagai masalah muncul salah satunya kesehatan jamaah haji geriatri atau lanjut usia seperti kondisi kesehatan secara fisik maupun kesehatan secara mental. Ada yang memiliki penyakit bawaan dari rumah, ada yang tidak cocok dengan cuaca di Mekkah Madinah ada juga jamaah yang mengalami kecemasan karena memikirkan hal-hal diluar kendali saat melaksanakan ibadah haji. Sebagai petugas haji harus tetap memberikan pelayanan yang terbaik untuk semua jamaah agar tetap menjalankan ibadah haji dengan nyaman dan menjadi haji yang mambrur.⁴²

⁴²Hasyim Hasanah, The Da'wah strategy through healt mitigation for geriatric hajj pilgrims in the Covid 19 with a humanistic psychology perpective. *Jurnal Ilmu Dakwah*. Vol. 43 No. 2 (2023). Hal. 5.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN MAKNA GELAR HAJI BAGI ANGGOTA DPRD PARTAI NASIONALIS KABUPATEN TEGAL

Pada pembahasan ini peneliti akan menyajikan analisis data wawancara yang telah dilakukan di Kantor DPRD Kabupaten Tegal dan wawancara via WhatsApp terkait makna gelar haji bagi anggota DPRD partai nasionalis Kabupaten Tegal. Untuk mendukung penelitian yang akan dikaji maka peneliti mewawancarai beberapa responden dari jajaran anggota DPRD partai nasionalis Kabupaten Tegal yang sudah melaksanakan ibadah haji. Dari hasil wawancara ini peneliti menemukan pengetahuan baru tentang makna gelar haji anggota DPRD Kabupaten Tegal sebagai berikut :

A. Gelar Haji Anggota DPRD Partai Nasionalis Kabupaten Tegal Sebagai Identitas Muslim

Identitas sendiri memiliki arti sebagai ciri yang dimiliki setiap pihak yang dimaksud sebagai suatu pembeda atau pembanding dengan pihak yang lain. Sedangkan identitas sebagai muslim yaitu amalan-amalan yang sudah menjadi kebudayaan Islam yang dianggap dan ditangkap sebagai identitas muslim. Dengan demikian, setiap kali seseorang melihat tradisi atau kebudayaan yang dilaksanakan oleh masyarakat Islam, ada asumsi yang menjadikan amalan-amalan tersebut sebagai tanda keberislaman. Pada bagian berikutnya nanti akan dijelaskan lebih rinci tipologi atau identitas muslim yaitu apa yang dikenal oleh Nahdhatul Ulama sebagai Islam nusantara dan yang dikenal oleh Muhammadiyah sebagai Islam berkemajuan.⁴³

Menurut Mujammil Qomar bahwa identitas muslim yang dimaksud merupakan ekspresi dari pengamalan ajaran Islam yang berasal dari persentuhan ajaran-ajaran Islam dengan budaya (tradisi) lokal telah melahirkan berbagai identitas baru yang melekat pada Islam itu sendiri. Identitas Islam yang baru ini menghasilkan berbagai respon dari kalangan umat Islam sendiri. Ada yang keras menolaknya, namun tidak sedikit yang

⁴³ Dedi Saputa Napitupulu, "Nasiobalisme dan Identitas Muslim", *TA'ALLUM: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol 7, no 1 (2019). Hal. 162.

dengan senang hati menerima dan mengamalkannya. Inilah yang kemudian menjadikan identitas muslim menarik untuk dikaji oleh para ilmuwan.

Menurut Ayi Sobarna, Islam itu memang satu, namun dalam proses pengkajiannya terdapat berbagai ragam ekspresi. Islam akan terus mengalami perkembangan sesuai dengan kemajuan zaman. Ini membuktikan bahwa Islam merupakan agama yang relevan dengan zaman. Sebagai agama yang rahmatan lil'alamin Islam membuktikan bahwa ajarannya tidak usang ditelan zaman dan dapat disesuaikan pada konteks waktu dan tempat kapan dan di mana saja.

Ibadah haji berpengaruh pada perubahan identitas, status sosial dan harga diri seseorang yang telah menunaikan haji. Perubahan setelah melaksanakan ibadah haji tidak hanya merubah semangat dalam hal beribadah maupun keagamaan, tetapi menjadi upaya peneguhan identitas sebagai muslim dengan cara memperkuat keimanan dan istiqomah dalam beribadah. Motif melaksanakan ibadah haji sebagai bagian dari kebutuhan biologis makhluk hidup. Selain itu juga di niatkan menjalankan perintah Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Ada pengalaman baru yang dirasakan oleh jamaah haji setelah pulang ibadah haji. Menurut Kisworo dengan judul penelitian "*Ibadah Haji Ditinjau Dari Berbagai Aspek*" hasil penelitian menunjukkan bahwa seseorang yang telah selesai melaksanakan ibadah haji dan umrah itu ibarat bayi yang baru lahir, diampuni segala dosa dengan ibarat dilahirkan kembali,

Secara personal menyandang gelar haji dapat membentuk simbolis pengalaman dan identitas sosial sebagai muslim, yang diharapkan dapat membawa sebuah perubahan yang menyangkut kesadaran secara personal dalam masyarakat. Umat muslim setelah pelaksanaan haji banyak mengalami konsep diri. Ada perubahan pola komunikasi orang-orang yang telah melaksanakan ibadah haji dengan masyarakat di lingkungannya.

Bagi masyarakat Kabupaten Tegal, Ibadah haji lebih dipahami sebagai sebuah prestise dan status sosial dibandingkan ibadah haji dipahami sebagai syariat Islam. Faktor tersebut yang membuat arti dari ibadah haji itu

bukan lagi hanya semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, akan tetapi sering digunakan sebagai jembatan untuk menaikkan gengsi sosial seseorang di tengah masyarakat. Menurut masyarakat Kabupaten Tegal mengenai haji yaitu apabila masyarakat yang sudah melaksanakan ibadah haji dan mendapat gelar haji maupun hajjah itu dapat menyeimbangkan dengan perilaku serta peranan sebagai orang yang sudah berhaji, karena orang yang sudah berhaji dianggap sebagai orang yang lebih memahami dan mendalami tentang agama. Tetapi sebaliknya jika orang yang sudah berhaji berperilaku tidak sesuai maka dianggap rendah oleh masyarakat. sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Sayid Abdul Qodir dalam wawancaranya via *WhatsApp* :

“Bagi saya haji tidak melahirkan gelar tetapi ibadah yang puncaknya bentuk ketakwaan, saya berangkat haji pada tahun 2019, sepulang haji saya itu ngga dipanggil pak kaji mba, jadi bukanya saya ngga pakai gelar itu tapi alhamdulillah saya dilahirkan dari darah daging Rasulullah saw adatnya orang-orang memanggilnya dengan gelar habib jadi gelar haji tersebut dianggap biasa. Dalam surat al-baqarah ayat 197 itu bunyinya “wa tazawwadu fa inna khairo zaidit taqwa” sing artine seapik-apike bekal itu taqwa. Jadi jangan salah niat ketika kita berhaji”.⁴⁴

Panggilan haji di Indonesia sebagai penghormatan dipersilahkan asalkan bukan orang yang melaksanakan ibadah haji yang meminta, panggilan haji memiliki makna sendiri yaitu sebagai pelindung orang-orang sekitar seperti keluarga dan masyarakat. Orang yang menyandang gelar haji ketika berada di lingkungan masyarakat harus memenuhi apa yang diharapkan masyarakat. Karena menurut masyarakat orang yang sudah melaksanakan ibadah haji harus terlihat suci dan sempurna dalam syariat agama. Orang yang memiliki status haji juga diharapkan aktif dalam kegiatan masyarakat dan mereka yang berstatus gelar haji harus menjaga perilakunya di masyarakat. Orang yang bergelar haji juga memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat mereka dianggap dapat memimpin dalam sebuah

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Sayid Abdul Qodir pada tanggal 17 Desember 2023 Pukul 19.37 WIB

kegiatan.⁴⁵ Menurut anggota DPRD partai nasionalis Kabupaten Tegal salah satunya Ibu Hj. Erni dari fraksi partai PDI-P. Dalam wawancaranya beliau mengatakan :

“Alhamdulillah saya melaksanakan ibadah haji pada tahun 2015, saya sangat bersyukur karena Allah meridhoi saya bisa menunaikan ibadah haji. Ibadah haji menurut saya itu ibadah yang paling nikmat dan penuh perjuangan mba. Sepulang saya ibadah haji dengan umumnya orang Indonesia di depan nama saya dipanggil hajjah. Saya tidak mempermasalahkan jika orang lain memanggil saya dengan sebutan hajjah, karena saya nawaitu melaksanakan ibadah haji ya ikhlas lillahi ta’ala. saya menghargai mereka yang memanggil saya haji ya saya anggap gelar haji itu menjadi penyemangat terutama buat diri saya agar lebih baik dalam beribadah”.⁴⁶

Bagi orang yang telah berhaji mereka menanggapi panggilan haji merupakan akibat dari apa yang telah mereka lakukan yaitu pergi ibadah. Panggilan haji diberikan masyarakat kepada orang yang sudah berhaji justru mengarah kepada hal yang positif yaitu dorongan dan dukungan bagi mereka agar senantiasa berperilaku bijak dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan sifat negatif itu kembali kepada individu, akan menjadi kesadaran untuk mereka tetap introspeksi diri agar tidak menjadi boomerang dilingkungan masyarakat terkait makna baik yang menjadi label gelar haji tersebut. Informan lain Bapak H. Samsuri B.H Nuryadi dari fraksi Gerindra dalam wawancaranya juga menjelaskan :

“Ibadah haji itu ibadah yang hampir semua orang Islam menjadi cita-cita ya, Alhamdulillah saya melaksanakan ibadah haji pake visa furada pas tahun 2018. Sepulang haji seperti biasa masyarakat memanggil saya dengan sebutan pak kaji, panggilan tersebut saya terima dengan hati senang dan ngga ada maksud sombong atau saya pengen dihormati. Tetapi saya berharap semoga saya dapat memberikan contoh baik bagi orang lain terutama keluarga dan masyarakat sekitar”.⁴⁷

Ibadah haji merupakan sebuah tindakan keagamaan yang melibatkan bentuk komitmen seseorang dengan Tuhannya karena pada realitas setelah

⁴⁵ Bela Fitri Wulandari, Gelar Haji Sebagai Stratifikasi Sosial Pada Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, Vol. 6. no 1 (2023). Hal. 7.

⁴⁶ Wawancara dengan Ibu Hj. Erni pada 16 Oktober 2023 Pukul 13. 23 WIB

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Samsuri B.H Nuryadi pada 16 Oktober 2023 Pukul 16. 05 WIB

kepulangan ibadah haji seseorang tersebut akan mendapatkan posisi baru dalam masyarakat dengan berubahnya status. Status baru tersebut menjadikan seseorang yang sudah melaksanakan ibadah haji dapat menjadi contoh yang baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Status haji tersebut tidak dapat dipungkiri karena kebiasaan tersebut memang sudah terjadi sejak zaman dahulu dalam kehidupan masyarakat. Bagi anggota DPRD Kabupaten Tegal menyangang gelar haji merupakan suatu hal yang biasa tetapi beberapa perubahan dapat dirasakan sebelum melaksanakan ibadah haji dan setelah melaksanakan ibadah haji. seperti yang dijelaskan Bapak H. Wasbun Jauhari dari fraksi PKB :

“Semenjak saya pulang haji alhamdulillah mba, saya merasakan perubahan sing luh apik dalam diri saya, sebelum saya haji saya tipe orang yang lumayan kurang sumeh kalo bertemu orang yang ngga saya kenal, tetapi setelah pulang haji semenjak itu ketika bertemu orang baik yang kenal atau ngga saya slalu usaha biar bertegu sapa dan senyum, dan setelah pulang haji saya yang dulunya menyantuni anak yatim setiap satu tahun sekali sekarang setiap bulan seperti menjadi suatu kewajiban saya untuk menyantuni anak yatim”.⁴⁸

Perubahan memang tidak dapat dipungkiri pasti akan ada pada diri seseorang, tidak memandang orang tersebut sudah melaksanakan ibadah haji atau belum, bagi yang sudah melaksanakan ibadah haji mungkin karena sudah merasakan kemantapan dalam hati, bukan hanya dari segi biaya pelaksanaan haji tetapi keyakinan terhadap diri sendiri mempunyai kemauan untuk berubah kearah yang lebih baik bukan hanya dalam konteks *Habluminanas* namun juga *Habluminallah*.

Ibadah haji juga mampu mengubah perspektif keagamaan dan konsep diri menjadi lebih baik yang diindikasikan dengan perubahan perilaku keimanan seperti keramahan, kedermawanan dan kepedulian. Salah satu bukti yang jelas tentang keterkaitan ibadah haji dengan nilai-nilai kemanusiaan antara lain adalah adanya ajaran tentang persamaan, keharusan memelihara jiwa, harta dan kehormatan orang lain, larangan melakukan

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak H. Wasbun Jauhari pada 16 Oktober 2023 Pukul 16. 37
WIB

penindasan atau pemerasan terhadap kaum lemah baik di bidang ekonomi maupun bidang-bidang lain. Tentu saja makna kemanusiaan dan pengamalan nilai-nilainya tidak hanya terbatas pada persamaan nilai kemanusiaan, tetapi mencakup seperangkat nilai-nilai luhur yang seharusnya menghiasi jiwa pemiliknya. Bermula dari kesadaran akan jatidiri serta keharusannya menyesuaikan diri dengan tujuan kehadiran di pentas bumi ini. Kemanusiaan menjadikan makhluk ini memiliki moral serta berkemampuan memimpin makhluk-makhluk lain dalam mencapai tujuan penciptaan. Kemanusiaan mengantarkannya untuk menyadari bahwa ia adalah makhluk yang harus bertanggung jawab menjadi pemimpin sekaligus makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendirian dan harus bertenggangrasa dalam berinteraksi. Mereka mendapat pengakuan dari masyarakat sebagai penyandang gelar haji sebagai apresiasi atas keberhasilan menyelesaikan perjuangan ibadah yang menjadi penyempurna rukun Islam yang kelima. Menurut Ibu Hj. Nurkholifah dari fraksi PDI-P juga mengatakan :

“Kalo di pedesaan mungkin tiap desa orang yang sudah haji itu masih sedikit jadi orang pedesaan menganggap haji itu sesuatu ibadah yang luar biasa, bagi saya ibadah haji ya ibadah penyempurnaan rukun Islam ngga ada tujuan untuk membanggakan diri atau pengen disegani. Saya biasa dipanggil sama warga sekitar kaji nur ya saya tetep menghormati kalo ngga dipanggil kaji ya ora masalah”⁴⁹

Para haji di pedesaan masih dianggap suatu hal yang sakral ada yang ingin selalu dipanggil haji ada juga yang menganggap panggilan haji tersebut tidak perlu, biasanya pengusaha atau pebisnis yang sudah berhaji di depan nama warung atau toko menggunakan nama semisal TOKO H. SLAMET, biasanya nama warung makan juga menggunakan WM. SATE H. SUGENG. Mungkin tujuan mereka menjadi personal *branding* untuk usahanya agar mudah dikenal dan menarik pembeli.

Masyarakat Indonesia sebenarnya menyadari bahwa panggilan atau gelar haji pada nama seseorang merupakan suatu peristiwa simbolik yang melekat dengan tradisi bangsa Indonesia. Sebenarnya mereka menyadari

⁴⁹ Wawancara dengan Ibu Hj. Nurkholifah pada 16 Oktober 2023 Pukul 15. 23 WIB

realitas gelar haji tersebut, namun pada kenyataannya mayoritas dari mereka terjebak dalam tradisi yang sudah menjadi sebagian penting dari interaksi dan komunikasi masyarakat Indonesia yang cenderung feodalisme. Mungkin awalnya sebagian masyarakat Indonesia yang baru pulang dari ibadah suci merasa risi atau kurang nyaman dipanggil haji tetapi lama kelamaan merasa terbiasa dengan panggilan tersebut, walaupun hati kecilnya mengingkari karena dapat menjadi beban tersendiri dengan konsekuensi seseorang yang sudah berhaji dalam persepsi masyarakat sebagai orang yang harus menampilkan perilaku yang baik.

Haji lebih penting substansinya dibanding simbol yang terkait dalam pelaksanaan ibadah hajinya. Sesuai dengan fakta yang terjadi di Masyarakat Indonesia tidak dapat di hindari untuk yang berhubungan dengan pasca setelah pelaksanaan ibadah haji. Pada umumnya terdiri dari kalangan berpendidikan dan kelompok sosial menengah atas yang memiliki karakteristik lebih mengedepankan aspek yang mencerminkan perilaku penyandang haji mabrur.⁵⁰

B. Gelar Haji Anggota DPRD Partai Nasionalis Kabupaten Tegal Sebagai Status Sosial

Ibadah haji bukan hanya sekedar ibadah semata saja, karena dalam kehidupan masyarakat ibadah haji juga dapat menaikkan status sosial. Di antara ibadah-ibadah yang lain ibadah haji merupakan ibadah yang memiliki kehidupan istimewa, karena hanya ibadah haji yang memakai atribut atau gelar yang menunjukkan bahwa orang tersebut telah melaksanakan ibadah haji. Berbeda dengan ibadah yang lain seperti ibadah salat, puasa, dan zakat yang tidak meninggalkan gelar bagi orang yang menjalankan ibadah tersebut.

Dalam ibadah haji tidak memandang status sosial dilihat dari pakaian ihram ketika berhaji. Pakaian ihram melambangkan kesatuan dan persamaan. Pakaian ihram juga mengajarkan kepada kita untuk menghapus

⁵⁰ Imron Rosyidi, Encep Dulwahab, “ Transformasi Konsep Diri Jamaah Haji” Vol. 13, no. 2, (2019). Hal. 37-38.

semua perbedaan serta menghapus segala kesombongan yang ditimbulkan dari status sosial. Setelah selesainya rangkaian ritual ibadah haji jamaah melepaskan pakaian ihramnya, tetapi spiritual baju ihram tetap melekat pada diri jamaah karena sebenarnya pakaian ihram hanya simbol lahiriah sedangkan makna yang terkandung dalam pakaian ihram secara batin ada di dalam hati dan tetap terjaga untuk tidak meninggikan status sosial. Dalam wawancaranya Bapak H. Miftachudin dari fraksi PKB mengatakan :

“2018 saya berangkat haji sebelum pileg 2019 itu saya berangkat bersama ibu dan istrinya, jujur saja nggih mba saya bukan orang yang paham agama tetapi saya alhamdulillah sekali selama pelaksanaan ibadah haji slalu diberi jalan yang gampang, contoh saja saat di Madinah saya niat harus sholat di depan eh pada saat saya balik ke hotel teman-teman jamaah lain geger katanya ngantri di raudhoh lama sekali, seketika itu saya tanya “raudhah kue neng ndi? Trus teman saya menjawab “masjid nabawi bagian ngarep” ternyata saya tadi barusan di raudhah ya. Nah mba saat saya di raudhah tadi itu saya berdoa agar jadi lagi anggota DPRD periode selanjutnya dan saya berdoa “mudah mudahan laka sing ora seneng karo aku kabeh seneng karo aku trus ora pada dadi musuh” maksudnya agar saat pileg banyak orang yang melas memilih saya menjadi anggota legislatif”.⁵¹

Anggota DPRD Kabupaten Tegal yang sudah melaksanakan ibadah haji sebagian menjadi petugas haji dalam membantu jamaah. Selain itu, ada juga anggota DPRD yang melaksanakan haji menggunakan haji plus dan haji furoda karena lamanya menunggu antrean haji reguler. Dalam menjalankan fungsinya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selalu mengedepankan aspirasi masyarakat yang diwakili oleh masing-masing anggota DPRD sesuai daerah pemilihan dan menjalankan visi misi sebagai anggota DPRD. Ibu Hj. Nurkholifah menuturkan dalam wawancaranya :

“Saya menjadi anggota dewan baru kelas 1 jadi saat periode 2014 saya belum mencalonkan diri jadi saya mengikuti pileg pada periode kemarin. Menurut saya sendiri haji merupakan panggilan dari Allah SWT karena belum tentu ya mba orang yang sudah mampu secara finansial maupun keseluruhan tetapi hatinya belum terketuk untuk melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji merupakan ibadah yang sangat spesial. Untuk perubahan signifikan dihidup saya sih saya merasa harus lebih dekat dengan Allah ibadah tepat waktu, ya alhamdulillah pada pileg kemarin saya dapet suara 5446 Dapil IV meliputi kecamatan Kedungbanteng, pangkah sama tarub, saya

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Miftachudin pada 16 Oktober 2023 Pukul 14. 12 WIB

bersyukur sekali mba Allah kasih amanah untuk saya jadi anggota DPRD Tegal saya niatkan karena Allah saya bekerja untuk membantu rakyat saya juga slalu ingat agar bekerja dengan hati-hati jangan sampe serakah karena saya niat cari berkah ”.⁵²

Menyandang gelar haji saat menjabat anggota dewan itu dapat menjadikan benteng agar lebih berhati-hati dalam bekerja dan dapat men-charge keimanan kembali bahwasanya hidup itu tidak selalu tentang duniawi. Dengan menyandang gelar haji tidak sepatutnya menjadi sombong. Perubahan setelah berangkat haji dengan sebelumnya haji itu kembali kepada personal jika hajinya diniatkan karena Allah SWT maka kebaikan selalu mengikuti dan menyertai. Mungkin sebelum berangkat haji dalam berpolitik kurang baik dengan masyarakat kemudian setelah berangkat haji banyak sekali pelajaran yang di dapat selama ibadah haji. Setelah pelaksanaan ibadah haji, sebaiknya dapat menjadi pencipta *agent of change* bagi Masyarakat dan bangsa dalam menuju kondisi yang ideal. Itulah esensi haji yang di proyeksikan agar menjadi manusia yang insan kamil yaitu manusia yang memiliki perubahan sosial dilingkungannya.⁵³ Bapak H. Wasbun Jauhari juga menyampaikan saat diwawancarai peneliti :

“Hampir semua anggota dewan yang sekarang periode sebelumnya sudah nyaleg tetapi ada yang sudah rejekinya ada juga yang rejekinya tahun ini, sebelumnya dapat suara 4382 sekarang 5.476 kenaikan suara tersebut saya mengevaluasi dari pileg periode selanjutnya dan bagaimana saya bisa menambah suara dari rakyat dalam kampanye pada saat itu. Predikat haji pada saat kampanye saya cantumkan di baliho-baliho yang biasa dijalan itu mba, saya tidak bermaksud ria atau sombong dengan gelar haji tersebut yang terpenting saya mempertahankan agar haji saya tetap mabrur dengan berhati-hati dalam menjalankan kehidupan terutama dibidang pekerjaan yang saya emban ini”.⁵⁴

Tanda-tanda kemabruran seseorang dalam haji yaitu, amal perbuatan setelah melaksanakan ibadah haji lebih baik dari sebelumnya, taat perintah Allah seperti salat, puasa dan zakat, mencintai kedamaian dalam lingkungan

⁵²Wawancara dengan Ibu Nurkholifah pada 16 Oktober 2023 Pukul 15. 23 WIB

⁵³Imron Rosyidi, Encep Dulwahab, “ Transformasi Konsep Diri Jamaah Haji” Vol. 13, no. 2, (2019). Hal. 37.38.

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Wasbun Jauhari pada 16 Oktober 2023 Pukul 16. 37 WIB

keluarga maupun masyarakat, berkiprah dalam memperjuangkan agama dengan cara yang baik serta bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga dan berupa dalam membantu orang lain.⁵⁵

Predikat gelar haji bagi anggota DPRD Kabupaten Tegal bukan hal yang luar biasa tetapi bagaimana ibadah haji yang menjadi penyempurnaan rukun islam dapat meningkatkan kesadaran untuk lebih giat dalam beribadah, menjadi orang yang peduli dengan orang yang lain dan lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan. Banyak perubahan konsep diri para anggota DPRD yang sudah berhaji karena dipengaruhi oleh lingkungan yang religius. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak H. Agus Solichin dalam wawancaranya :

“Haji bagi saya ibadah yang sangat istimewa, saya masih teringat beberapa tahun yang lalu saya berangkat haji bersama istri saya itu pas tragedi terowongan mina tahun 2015an. saya menganggap haji itu ibadah yang penuh perjuangan lahir batin bukan hanya sekedar mengejar gelar haji. Jadi saya mengambil hikmah dari haji agar saya selalu menjadi orang yang berhati-hati dalam mengambil keputusan atau tindakan. Alhamdulillah saya jadi anggota DPRD sudah tiga kali ini dan alhamdulillah periode ini saya diamanahi jadi wakil ketua III dengan harapan saya dan teman-teman yang lain selalu kompak dalam menjalankan program kerja daerah dengan baik dan tepat”.⁵⁶

C. Gelar Haji Anggota DPRD Partai Nasionalis Kabupaten Tegal Sebagai Calon Legislatif

Kehidupan manusia di dalam masyarakat memiliki peranan penting dalam sistem politik suatu negara. Setiap warga negara dalam kesehariannya hampir selalu bersentuhan dengan politik, baik yang bersimbol maupun tidak. Media sebagai wadah dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Hal inilah yang mendorong individu atau kelompok secara tidak langsung mengonsumsi prasarana informasi politik yang selanjutnya menjadi

⁵⁵ Joko Tri Haryanto, Anasom, Mahlali Syukur, Imam Fadhilah Mustahgfirin. “*Panduan Perjalanan Jamaah Haji*” (Semarang : Diva Press 2021). Hal. 236.

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Agus Solichin pada 17 Desember Pukul 16.33 WIB

pengetahuan politik. Dalam fenomena ini penyebaran informasi sebagai pendidikan politik menggunakan media alat peraga kampanye. Tinggi rendahnya pengetahuan politik atau kesadaran politik memiliki dampak yang berbeda dimana perbedaan itu mempengaruhi jumlah partisipasi politik masyarakat yang umumnya dalam sebuah pemilihan.

Pemilihan umum atau pemilu merupakan sarana sebagai pengamalan demokrasi dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Secara teknis penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan oleh komisi pemilihan umum (KPU) dan mendapat dukungan dari masyarakat sebagai faktor penting dalam proses pemilihan umum.⁵⁷ Pemilu juga menjadi pesta rakyat yang memiliki serangkaian kegiatan yang memerlukan berbagai persiapan kandidat agar memperoleh suara terbanyak. Salah satu proses pelaksanaan pemilihan umum yaitu kampanye. Kampanye merupakan proses menarik simpati agar mau memilih salah satu calon kandidat dalam pemilihan umum, Dinamika kegiatan kampanye pemilihan umum legislatif semakin meregang, setelah pembatalan Pasal 214 Undang-undang No. 10 Tahun 2008 yang mengatur tentang penetapan calon anggota legislatif terpilih.

Kampanye dapat dilakukan melalui poster atau baliho, umumnya poster kampanye terdiri dari elemen tekstual dan grafis. Unsur tekstual dan grafis disusun oleh calon kandidat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Sehingga unsur tekstual dari sebuah poster secara leksikal dan struktural telah dipilih agar dapat secara efektif menyampaikan informasi, dalam hal ini informasi mengenai seorang kandidat. Di sisi lain, unsur grafis pada poster kampanye menekankan pada potret calon kandidat. Hal tersebut agar masyarakat mengenal dan familiar dengan wajah calon kandidat sehingga dapat menguatkan kesan pertama pada pemilih.

Penelitian tentang pengaruh representatif terhadap daya pilih telah dilakukan sebelumnya di berbagai negara. Seperti penelitian *Ballot*

⁵⁷ Miriam Budiardjo, "*Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), Hal. 73.

Photographs as Cues in Low information Elections dengan metode eksperimen dan survei. Penelitian ini menemukan bahwa daya tarik fisik kandidat pemilihan umum mempengaruhi persuasi masyarakat melalui foto di kertas suara maupun poster atau baliho, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa representasi diri kandidat sangat penting dengan tujuan persuasi dari kampanye.

Beberapa analisa aspek yang ada pada poster atau baliho kandidat calon legislatif dinilai penting untuk diperhatikan yaitu nama calon legislatif, partai, jargon, *gestur* dan pose foto. Dari aspek nama caleg umumnya menggunakan nama lengkap dengan gelar yang telah dicapainya baik itu dalam bidang pendidikan, penghargaan prestasi maupun kandidat yang telah melaksanakan ibadah haji umumnya mencantumkan gelar haji atau hajjah di depan namanya contohnya seperti Hj. Erni Amd.Par.

Sebagaimana diakui oleh kalangan ilmuwan politik yaitu Robert Dahl, *prestige* merupakan salah satu bagian penting dari *political resources* (sumber daya politik) seseorang, maka bukan suatu hal yang langka di masa menjelang pemilihan daerah, pemilihan presiden maupun pemilihan calon legislatif. Banyak politisi yang menunaikan ibadah haji maupun umrah dengan harapan *prestige* simbol haji dan umrah mampu menunaikan tingkat elektabilitas. Menurut Bapak H. Samsuri B.H Nuryadi menuturkan dalam wawancaranya bahwa :

“Saya jadi anggota legislatif sudah dua periode, periode 2014 dapat suara 4.129 dan 2019 suaranya 3.817, periode selanjutnya itu penurunan suara tetapi tetap terpilih jadi anggota karena lawan calon yang lain suaranya di bawah saya. periode 2014 saya jadi wakil ketua DPRD Kabupaten Tegal saat itu di ketuai oleh Bapak A. Firdaus. Saat masa-masa kampanye ya pada umumnya saya memasang gambar saya baik di poster baliho dan baju disitu saya cantumkan gelar haji karena warga tegal yang kenal saya lebih mengenal saya dengan panggilan pak kaji sam, kalo pengaruh gelar tersebut untuk menarik suara dari warga menurut saya pengaruh tidaknya tergantung hati nurani warga sendiri ya”.⁵⁸

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Samsuri B.H Nuryadi pada 16 Oktober 2023 Pukul 16. 05
WIB

Menurut Moelyono dalam Sartika slogan yaitu kalimat yang menarik, yang sangat terlihat dan mudah diingat untuk menyampaikan sesuatu.⁵⁹ Sedangkan dalam makna lain slogan adalah motto atau frasa yang dipakai pada konteks politik, komersial, agama dan lainnya sebagai ekspresi sebuah ide atau tujuan yang mudah diingat. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Ibu Hj. Lina Agustina dari fraksi PDI-P, beliau menceritakan :

“Pada tahun 2012 saya berangkat haji, saya sudah tiga periode ini jadi anggota dewan, kalo ditanya apa makna gelar haji bagi anggota DPRD, menurut saya gelar atau panggilan haji itu sebuah adat orang Indonesia, setahu saya negara lain tidak seperti di Indonesia ya mba, pulang haji ya seperti biasa tidak ada gelar apa pun. pada saat kampanye di baliho pinggir jalan saya cantumkan gelar hajjah begitu juga di kaos yang saya buat tulisannya gini mba “LAKA LIYA KAJI LINA” yang artinya tidak ada pilihan lain selain memilih saya alias ibu lina. karena setiap calon legislatif memiliki slogan yang berbeda untuk menarik perhatian masyarakat. Kalo hasil suara dari periode-periode ada perubahan mba pas 2014 itu saya dapet suara sekitar 5 ribu lebih kalo periode kemarin itu saya dapet 5.709 suara”.⁶⁰



Gambar 4. 1 Kampanye Calon Anggota Legislatif

⁵⁹Azhar Marwan, Evi Hafizah. *Pengaruh Slogan Kampanye Pasangan Kandidat Calon Walikota Bengkulu Terhadap Persepsi Para Pemilih*, Jurnal Kaganda Vol. 3 No. 1, April 2019. Hal. 57.

⁶⁰ Wawancara dengan Ibu Hj. Lina Agustina pada 15 Desember 2023 Pukul 21.03

Para calon legislatif membuat baliho atau poster kampanye semenarik mungkin untuk memikat para pemilih. Calon legislatif juga memanfaatkan baliho poster atau di kaos untuk menampilkan diri beserta slogan yang terdapat di dalamnya tersebut. Slogan juga memiliki kekuatan untuk mengubah *mindset* dan opini publik terhadap kandidat calon legislatif serta menjadi alat untuk meyakinkan masyarakat dan juga mampu mendorong popularitas dan *image* calon legislatif.⁶¹

Hj. Erni menuturkan juga bahwa “Gelar haji tidak ada pengaruhnya untuk suara dari masyarakat lebih kepada anggota DPRD untuk meyakinkan masyarakat supaya masyarakat lebih percaya dan menitipkan kepanjangan dari masyarakat, nah insya Allah masyarakat memilih saya lagi. Tetapi suara pada periode 2014 dan 2019 ada kenaikan pada periode 2014 mendapat suara 3570 sedangkan pada periode 2019 dapat suara 4664. saya memandang politik itu seni tetapi politik yang berbudaya buka budaya politik. Menyandang predikat hajjah itu lebih banyak untuk memperbaiki diri dari sebelum berhaji.”⁶²

Budaya politik merupakan persepsi manusia terhadap berbagai masalah yang ada dalam dunia politik dan peristiwa politik terbawa dalam pembentukan struktur politik dan kegiatan politik masyarakat maupun pemerintah yang disebabkan karena sistem politik itu sendiri yaitu hubungan antara manusia yang menyangkut persoalan kekuasaan, aturan dan wewenang. Pengamatan budaya politik dari masyarakat merupakan sesuatu yang penting karena menentukan sikap perilaku politik yaitu masyarakatnya itu sendiri. Jadi ketika suatu pemilihan umum diselenggarakan, maka kita dapat menilai budaya politik di suatu negara.⁶³

Perubahan perolehan suara pada pemilihan legislatif dipengaruhi oleh perilaku pemilih. Ada pemilih yang secara konsisten memilih partai tertentu pada setiap pileg dan ada juga pemilih yang tidak konsisten. Sikap

⁶¹ Arya Idil Pratama, Muhammad Zein Abdullah, Saidin “Analisis Semiotika Makna Slogan Kampanye Caleg DPRD Kota Kendari”, *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi*. Vo. 5, no. (2020) Hal. 113.

⁶² Wawancara dengan Ibu Hj. Erni pada 16 Oktober 2023 Pukul 13. 23 WIB

⁶³ Muhadam Labolo, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2015). Hal 48.

dan perilaku pemilih tipe yang pertama tidak mudah dipengaruhi dengan adanya isu yang muncul saat menjelang pileg sedangkan tipe pemilih yang kedua rentan dengan pengaruh adanya isu-isu yang berkembang menjelang pileg. Jika dalam pelaksanaan pemilihan legislatif banyak tipe yang kedua maka perolehan suara partai akan mengalami fluktuasi tinggi. Dalam ilmu politik ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam memahami perilaku pemilih dalam pemilihan umum legislatif.

Pertama, pendekatan sosiologis yang dikenal dengan sebutan mazhab Colombia. Pendekatan sosiologis ini menyatakan bahwa preferensi seseorang terhadap partai politik dipengaruhi oleh latar belakang sosialnya. Dalam pendekatan mazhab Colombia ini diyakini bahwa perilaku Masyarakat pemilih dipengaruhi oleh status sosial, ekonomi, agama, umur, ras, jenis kelamin dan lain sebagainya. Menurut Jamse Brotho “*Broader social characteristics remain the basic determinants of political preference*” (Gaffar, 1992). Sementara itu Lazarfel peneliti dari Universitas Colombia berpendapat bahwa “*a person thinks politically as he is socially. Social characteristics determinane political pereference*” Maksudnya seseorang berpikir tentang masalah politik sesuai dengan latar belakang dan karakteristik sosialnya, karakteristik sosial menentukan pereferensi politik.

Kedua, pendekatan psikologis yang dikenal dengan sebutan Mazhab Michigan. Pendekatan ini berpendapat bahwa perilaku pemilih dipengaruhi oleh kondisi psikolog masyarakat. Pendukung pada pendekatan Michigan ini berkeyakinan bahwa perilaku masyarakat pemilih dipengaruhi karena sikap seseorang terhadap partai politik, sikap terhadap kandidat calon legislatif dan isu-isu yang berkembang di lingkungan sebelum pelaksanaan pemilu. Yang dimaksud sikap terhadap partai politik yaitu kedekatan hubungan seseorang dengan partai politik tertentu sebagai proses sosialisasi politik yang diterima sejak masa kanak-kanak sampai dewasa. Sikap terhadap kandidat calon legislatif yaitu hasil evaluasi seseorang terhadap calon kandidat yang dicalonkan dalam pemilu. Sedangkan sikap terhadap isu-isu yang berkembang di lingkungan sebelum pelaksanaan pemilu

berkaitan dengan respons partai politik menanggapi berbagai isu yang berkembang sebelum pemilu.

Ketiga, pendekatan rasional yang biasa disebut dengan pendekatan ekonomi atau *rational choice* yang berkeyakinan bahwa seorang pemilih partai politik pada pemilu berdasarkan perhitungan untung dan rugi. Maksudnya pemilih akan memilih dalam pemilu kepada partai politik yang dapat memberi keuntungan atau tidak merugikan kepada pemilih (Asfar 1996).

Penelitian lain juga melakukan penelitian perilaku pemilih yang dilakukan oleh J. Kritiadi pernah menggunakan pendekatan *socio cultural* sebagai pendekatan sosiologis. Pendekatan ini kondisi sosial budaya berpengaruh terhadap perilaku pemilih. Hasil penelitian ini juga menyatakan bahwa perilaku pemilih dapat dipengaruhi dengan pola panutan artinya seseorang pemilih dalam memilih partai politik sesuai dengan anjuran tokoh yang diyakini sebagai panutan. Karena masyarakat meyakini kepatuhan terhadap tokoh yang dijadikan panutan dalam budaya masyarakat Jawa sangat tinggi sehingga berpengaruh dalam perilaku pemilih dalam pemilu.⁶⁴ Dalam pembahasan ini, peneliti mewawancarai narasumber yang lainnya. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak H. Miftachudin saat diwawancarai peneliti secara langsung di Kantor DPRD Kabupaten Tegal beliau menyampaikan:

“Saya jadi dewan sudah 2 periode. Periode pertama saya dapat suara sekitar periode pertama saya dapat 4000 periode kedua saya dapat 4740, dan insya allah periode selanjutnya saya nyalon lagi mba, minta doa restu dan dukungannya nggih mba. Gelar haji bagi saya ya hanya sekedar gelar saja yang umumnya diberikan sama masyarakat kepada orang yang baru pulang haji. saya pakai gelar haji di baliho saat kampanye ya saya ngikut sama sama caleg lainnya yang pake gelar haji, kalo pengaruh atau tidaknya gelar haji tersebut saya kembalikan kepada pemilih yaitu masyarakat karena itu sebagai hak pilih mereka untuk memilih caleg yang mereka rasa cocok untuk membangun dan memajukan daerahnya”.⁶⁵

⁶⁴M. Fachri Adnan “ Faktor-Faktor yang mempengaruhi perolehan suara partai politik pada pemilihan umum, Vol, 1 no. 1 (2002). Hal. 39-40.

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Miftachudin pada 16 Oktober 2023 Pukul 14. 12 WIB

Gelar haji itu menjadi kendali manusia agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang Allah SWT dalam mempertahankan kemabruran ibadah yang telah dilaksanakan. Gelar haji juga memiliki makna kepercayaan yang dapat memberikan suatu jaminan bahwa orang yang berhaji sudah pasti amanah, tanggung jawab dan jujur. Tetapi kembali kepada diri masing-masing karena seseorang dapat dipercaya atau tidak tergantung rekam jejak kehidupan. Bapak Sayid Abdul Qodir menyampaikan dalam wawancaranya:

“Saya terjun di dunia politik karena *support* dari keluarga dan masyarakat alhamdulillah periode kemarin pertama kali saya jadi anggota dewan dengan jumlah suara 7821 dan insya Allah 2024 saya maju lagi harapan saya jika Allah meridhoi saya jadi wakil rakyat yang kedua ini semoga jadi wakil rakyat yang shidiq, tabligh, amanah dan fathonah”.⁶⁶

Beberapa anggota DPRD Partai Nasionalis yang sudah berhaji periode selanjutnya mendaftarkan kembali sebagai calon anggota legislatif dengan harapan mendapat dukungan dari masyarakat agar terpilih kembali menjadi anggota dewan. Motivasi anggota DPRD mencalonkan kembali sebagai anggota dewan masing-masing memiliki jenis kebutuhan dan keinginan dan tujuan yang berbeda. Menurut Santrock ada dua faktor yang menyebabkan motivasi dalam diri seseorang itu berbeda-beda, yang pertama faktor internal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari individu, contohnya caleg perempuan di partai nasionalis termotivasi karena merasa prihatin dengan keadaan dan kondisi partai nasionalis itu sendiri. Yang kedua faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar individu seperti ideologi partai, visi misi partai dan program partai.

Motivasi dalam dunia politik dijelaskan dari beberapa hal yaitu untuk kebutuhan kekuasaan, kebutuhan berprestasi, kebutuhan status, kebutuhan keamanan aktualisasi diri dan memperjuangkan aspirasi

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Sayid Abdul Qodir pada tanggal 17 Desember 2023 Pukul 19.37 WIB

masyarakat.⁶⁷ Motivasi tinggi menjadi salah satu faktor yang menandakan bahwa calon legislatif menyadari pentingnya keberadaan mereka dalam Lembaga politik untuk menyuarakan hak-hak rakyat. Terutama calon legislatif perempuan karena mereka memiliki kebutuhan khusus yang hanya dapat di pahami oleh kaum perempuan. Selain itu motivasi lain juga dipengaruhi oleh budaya contohnya Aceh. Jika dilihat dari kacamata sejarah, Aceh memiliki nama-nama perempuan yang memiliki jiwa pahlawan serta perempuan yang terjun dalam bidang pemerintahan yang menjadikan Indonesia dikenal dunia seperti Cut Nyak Dhien, Laksamana Malahati, Nur Al Alam Nagiyhat Ad-Din Syah dan lain sebagainya.⁶⁸ Ibu Hj, Nofiyatul Faroh menuturkan dalam wawancaranya via *WhatsApp*:

“Pertama saya niatkan haji karena rahmat Allah njih mba, alhamdulillah sepulang saya haji pada tahun 2017 saya merasakan bahwa Allah selalu mempermudah cita-cita yang saya inginkan, salah satunya jadi anggota dewan, alhamdulillah juga mba saat saya nyaleg banyak dukungan dari masyarakat terutama ibu-ibu Fatayat lingkungan kecamatan Bojong yang selalu bersemangat mendorong dan mendukung saya, kebetulan saya juga aktivitas organisasi Fatayat di Pimpinan Cabang (PC) dan Pimpinan Anak Cabang (PAC). Haji bagi pribadi saya penyempurnaan rukun Islam yang kelima dengan tujuan menjadi haji yang Mabruroh, dan alhamdulillah Allah mengizinkannya. kalo gelar haji yang saya pasang di baliho itu dari dulu sudah menjadi kebiasaan umum caleg-caleg setiap daerah, sebenarnya gelar tersebut dipasang atau tidaknya ngga masalah bagi saya yang terpenting bagaimana saya bisa memberikan keyakinan kepada masyarakat, mohon doanya periode tahun depan saya maju lagi”.⁶⁹

⁶⁷Erwinda, Motivasi Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia asal Riau pada Pemilihan Umum 2014. *Jom Fisip* Vol. 2 no. 1 (2015). Hal 7-10.

⁶⁸Siti Hajar Sri Hidayati, Risana Rachamatan, Eka Dian Aprilia. Motivasi Caleg Perempuan ditinjau dari Asal Partai Politik *Jurnal Penelitian Psikologi*, Vol 07, no 2 (2016) Hal 10.

⁶⁹Wawancara dengan Ibu HJ. Nofiyatul Faroh pada 16 Desember Pukul 08.41.



Gambar 4. 2 Nofiatul Faroh, Anggota DPRD Kabupaten Tegal Fraksi PKB

Menurut McClelland ada tiga kebutuhan yang mempengaruhi motivasi individu yaitu *need for power*, *need for affiliation* dan *need for achievement*. Apabila salah satu motivasi individu sangat dominan dibandingkan dengan motivasi individu yang lainnya, maka akan memunculkan perilaku yang berbeda pada diri seseorang, salah satunya motivasi dalam mencalonkan sebagai anggota legislatif. Berikut penjelasan ketiga motivasi individu.⁷⁰

Motivasi *Need for power* atau motivasi dalam kekuasaan merupakan suatu kebutuhan untuk mempengaruhi dan mengendalikan orang lain sehingga menjadikan orang tersebut mengikut perintah tanpa ada paksaan dari orang yang memberi perintah. Motivasi *Need for power* pada caleg perempuan di partai nasionalis yang kategorinya religius dapat disebabkan karena asal usul pengurus partai nasionalis yang merupakan tokoh dari organisasi masyarakat (ormas) contohnya seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memiliki pengaruh dengan umat Islam di Indonesia, memiliki kemampuan mobilisasi dengan ormas lainnya sehingga dengan kemampuan tersebut menjadikan partai nasionalis mendapat kemenangan dalam pemilu.⁷¹ Gelar haji juga dapat mendorong persepsi masyarakat yang menganggap orang yang sudah berhaji memiliki bekal ilmu agama yang bagus, oleh karena itu dapat menunjang dan meyakinkan masyarakat sebagai pemilih bahwa jika orang tersebut terpilih menjadi anggota DPRD maka kinerja yang dihasilkan dinilai baik.

⁷⁰ Siti Hajar Sri Hidayati, Risana Rachamatan, Eka Dian Aprilia. Motivasi Caleg Perempuan ditinjau dari Asal Partai Politik *Jurnal Penelitian Psikologi*, Vol 7, no 2 (2016) Hal 4.

⁷¹ Siti Hajar Sri Hidayati, Risana Rachamatan, Eka Dian Aprilia. Motivasi Caleg Perempuan ditinjau dari Asal Partai Politik *Jurnal Penelitian Psikologi*, Vol 7, no 2 (2016) Hal 10.

Motivasi *Need for affiliation* yaitu suatu kebutuhan untuk mengembangkan dan memelihara hubungan dalam diri seseorang dengan orang lain. Partai nasionalis memiliki *Need for affiliation* yang tinggi disebabkan oleh beberapa hal seperti keberadaan partai nasionalis dianggap mampu menyerap aspirasi dari masyarakat. Motivasi *Need for achievement* merupakan kebutuhan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, pada caleg partai nasionalis merupakan partai politik yang terdapat di seluruh Indonesia dan berpartisipasi dalam partai tentu menjadikan peluang bagi calon anggota legislatif. Pengalaman pada politik mempengaruhi persepsi calon legislatif mengenai peranan di legislatif, semakin tinggi jenjang Pendidikan seseorang maka akan semakin baik kerangka berpikirnya sehingga akan menolong seseorang dalam menentukan keputusan suatu pandangan terhadap nilai-nilai baru yang akan diterimanya, misalnya pemilihan partai politik yang tepat dan strategi dalam berkampanye tepat dan menarik. Caleg di partai nasionalis memiliki *Need for achievement* yang dominan disebabkan oleh tuntutan partai yang mengharuskan setiap anggotanya harus memiliki prestasi yang baik.⁷²

⁷²Siti Hajar Sri Hidayati, Risana Rachmatan, Eka Dian Aprilia. Motivasi Caleg Perempuan ditinjau dari Asal Partai Politik *Jurnal Penelitian Psikologi*, Vol 7, no. 2 (2016) Hal 12.

BAB V

PENUTUP

B. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Makna Gelar Haji Bagi Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) partai nasionalis Kabupaten Tegal menghasilkan kesimpulan bahwa makna gelar haji bagi setiap anggota DPRD partai nasionalis berbeda-beda. Makna gelar haji menurut anggota DPRD tidak ada pengaruh dalam suara pemilihan legislatif tetapi saat terpilih menjadi anggota DPRD, gelar haji tersebut dapat menjadikan motivasi agar selalu mempertahankan kemabruran haji dengan lebih bertanggung jawab dalam bekerja. Makna gelar haji juga dibagi dalam tiga makna yaitu gelar haji anggota DPRD partai nasionalis Kabupaten Tegal sebagai identitas muslim, gelar haji anggota DPRD partai nasionalis sebagai status sosial dan gelar haji anggota DPRD partai nasionalis sebagai calon legislatif.

C. Saran

Dalam penelitian ini masih banyak kekurangan. Setelah peneliti melakukan penelitian tentang Makna Gelar Haji Bagi Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) partai nasionalis Kabupaten Tegal, maka peneliti memberikan beberapa saran masukan di antaranya :

1. Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tegal lebih mengedepankan aspirasi masyarakat, memberikan perubahan yang lebih baik di lingkungan masyarakat dan lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan.
2. Bagi pembaca, semoga penelitian ini menjadi khazanah keilmuan baru dalam makna gelar haji khususnya bagi anggota DPRD partai nasionalis.
3. Bagi peneliti selanjutnya, di dalam penelitian ini masih banyak kekurangan. Skripsi ini dibatasi pada pembahasan makna gelar haji bagi anggota DPRD. Perlu penelitian lebih lanjut terhadap makna gelar haji dalam dunia politik.

D. Penutup

Dengan mengucapkan rasasyukur peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini walaupun jauh dari kata sempurna, baik isi dalam materi, penulisan bahasa dan lain sebagainya. Peneliti sadar bahwa sebagai manusia tidak lepas dari kesalahan, sehingga permohonan maaf peneliti sampaikan dalam skripsi ini. Kritik dan saran sangat peneliti harapkan sebagai bekal untuk penelitian selanjutnya, Peneliti mengucapkan terimakasih kepada semua yang telah membantu penelitian ini dari langkah awal penulisan hingga menyelesaikan skripsi ini. Peneliti hanya berdo'a semoga Allah SWT membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Ash-Shiddieqi, T.M Hasbi. *Pedoman Haji*. Jakarta: Bulan Bintang,1983.
- Budiardjo,Miriam., *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta.PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Choliq, Abdul. *Panduan Manasik Haji*, Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2002.
- Ilham, Muhadom, L., dan Teguh. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: PT Grafindo Persada,2015.
- Indartini, Mintarti., Nurharibnu Wibisono., dan Assitriadi Widhiseno. *Peran dan fungsi DPRD dalam perencanaan dan Penganggaran Daerah*. Solo: Penerbit Taujih,2019
- Haryoko, Saptop. Bahartiar, Fajar Arwadi. *Analisis Data Kualitatif (Konsep, Teknik dan Prosedur Analisi)*. (Makassar : Badan Penerbit UNM 2020).
- Kartodirodjo, Sartono. *Pemberontakan Petani Banten 1888* Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1984.
- Pamungkas, Sigit. *Partai Politik (Teori dan Praktik di Indonesia)* Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism,2011.
- Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan 2017.
- Sattar, Abdul, Ali Murtadho, Hasyim Hasanah, dan Vina Darissurayya. *Implementasi Desain Manasik Haji Alternatif Pembelajaran Manasik Calon Jamaah Haji Kota Semarang*. Semarang: Fatawa Publishing, 2021
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Supardi. 1989. *Perayaan Mekah*. Jakarta: INIS,2013.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar* (Cet. XXXI Jakarta: Rajawali Pers 2001),

Sumber Penelitian/Jurnal

- Aldhania Uswatun Hasanah. 2023. Kolonialisasi Gelar Haji : Inisiasi Belanda Waspada Perlawanan Umat, *Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemsyarakatan*. Vol. 17, No. 4
- Bela Fitri Wulandari. 2023. Gelar Haji Sebagai Stratifikasi Sosial Pada Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, Vol. 6.
- Erwinda. 2015. Perwakilan Daerah Republik Indonesia asal Riau pada Pemilihan Umum 2014. *Jom Fisip* Vol. 2 No. 1.
- Firda, Jamaluddin Hos dan Ambo Upe. 2019. "Makna Sosial Haji Pada Suku Bugis." *Neo Societal* Vol 4 No.4.

- Hasyim Hasanah. 2023. "The Da'wah strategy through health mitigation for geriatric hajj pilgrims in the Covid 19 with a humanistic psychology perspective". *Jurnal Ilmu Dakwah*. Vol. 43 No. 2.
- Imron Rosyidi, Encep Dulwahab, 2019 " Transformasi Konsep Diri Jamaah Haji" Vol. 13, No. 2.
- Khusna, Azalia Mutammimatul. 2018. "Hakekat Ritual Ibadah Haji dan Maknanya berdasarkan Pemikiran William R. Roff." *Jurnal Humaniora* 2, No 2.
- Kisworo, Budi. 2017. "Ibadah Haji Di Tinjau Dari Berbagai Aspek." *Jurnal Hukum Islam*.
- Muhammad Noor. 2018 Haji dan Umrah. *Jurnal Humaniora dan Teknologi Volume 4, Nomor 1*.
- Saptono, Nanang. 2019. "Latar Belakang Pemakaian Gelar Haji." *Jurnal Arkeologi Balai Arkeologi Jawa Barat* 1 (2).
- Sulisyawati. 2004. "Nama dan Gelar di Keraton Yogyakarta." *Jurnal Humaniora* 16. No 3.
- Zella Famelia, " Makna Gelar Haji Pada Masyarakat Urban Dalam Menumbuhkan Kesalehan Sosial (Studi Kasus di Perumahan BPI Ngaliyan Semarang)". Skripsi S1 UIN Walisongo Semarang 2023
- Zukmawati. 2018. "Makna Simbolik Haji (Studi pada Kelurahan Tonrorita Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa)", Universitas Negeri Makassar.

Sumber Website

- Isabela, Monica Ayu Caesar. 2022. *Ideologi Partai Politik di Indonesia : Nasionalis dan Islamis*, 2022.
<https://nasional.kompas.com/read/2022/06/11/03000001/ideologi-partai-politik-di-indonesia-nasionalis-dan-islamislamis>, di akses pada Hari Senin, 22 Mei 2023. di akses pada Hari Senin, 22 Mei 2023.

Wawancara

- Wawancara dengan Ibu Hj. Erni pada 16 Oktober 2023 Pukul 13. 23 WIB*
- Wawancara dengan Ibu Nurkholifah pada 16 Oktober 2023 Pukul 15. 23 WIB*
- Wawancara dengan Bapak Wasbun Jauhari pada 16 Oktober 2023 Pukul 16. 37 WIB*
- Wawancara dengan Bapak Miftachudin pada 16 Oktober 2023 Pukul 14. 12 WIB*
- Wawancara dengan Bapak Samsuri B.H Nuryadi pada 16 Oktober 2023 Pukul 16. 05 WIB*
- Wawancara dengan Bapak Agung Yudhi Kurinawan pada 16 Oktober 2023 Pukul 13. 24 WIB*
- Wawancara dengan Ibu Hj. Lina Agustina pada 15 Desember 2023 Pukul 20.17 WIB*
- Wawancara dengan Ibu Hj. Nofiyatul Faroh pada 16 Desember Pukul 08.41 WIB*

Wawancara dengan Bapak H.Agus Solichin pada 17 Desember Pukul 16.33 WIB
Wawancara dengan Bapak Sayid Abdul Qodir 17 Desember Pukul 19.37 WIB

LAMPIRAN-LAMPIRAN

i. Pedoman Wawancara

Narasumber : Anggota DPRD Partai Nasionalis yang sudah berhaji

1. Kapan Bapak/Ibu melaksanakan ibadah haji?
2. Apa pengertian ibadah haji menurut anggota DRRD Kabupaten Tegal?
3. Apa makna gelar haji bagi anggota DRRD Kabupaten Tegal?
4. Apa dampak personality anggota DPRD menyandang gelar haji?
5. Apakah Bapak/Ibu pada periode 2014/2019 mencalonkan sebagai anggota legislatif?
6. Jika Bapak/Ibu mencalonkan sebagai anggota legislatif pada periode 2014/2019 berapa perolehan suara yang di dapat?
7. Berapa perolehan suara pada periode 2014/2019?

ii. Dokumentasi

1. Ibu Hj. Erni dari Partai PDI-P



2. Bapak H. Samsusuri B.H Nuryadi dari Partai Gerindra



3. Ibu Hj. Nurkholifah dari Partai PDI-P



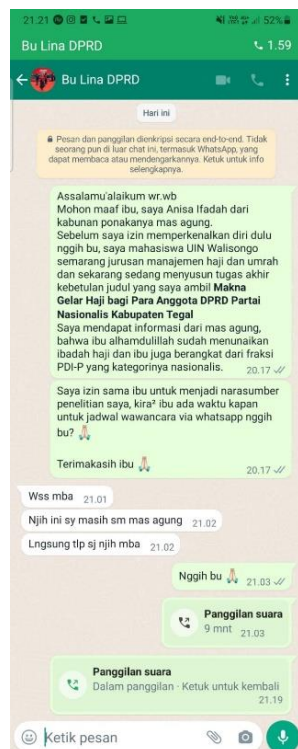
4. Bapak H. Miftachudin dari fraksi PKB



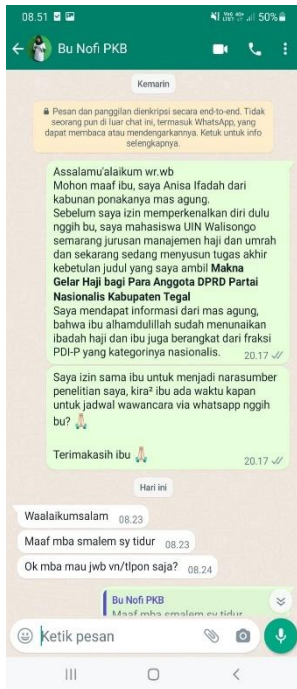
5. Bapak H. Wasbun Jauhari dari fraksi PKB



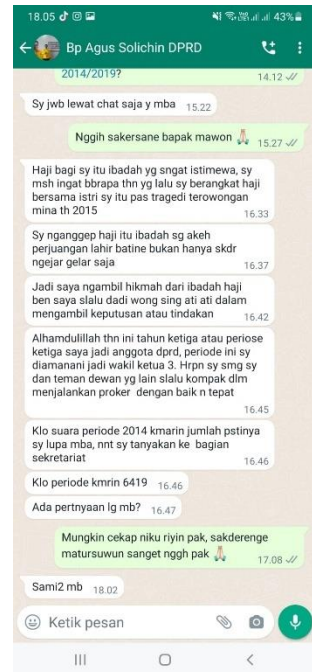
6. Ibu Hj. Lina Agustina dari fraksi PDI-P Via WhatsApp



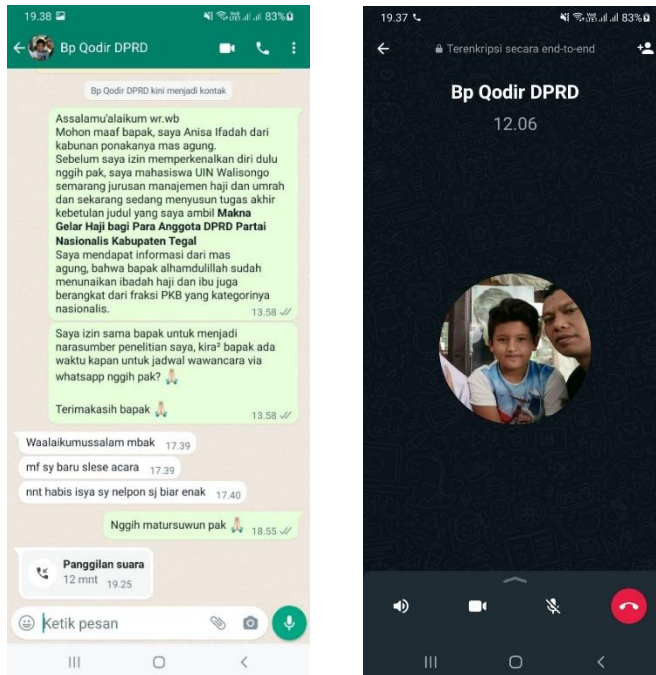
7. Ibu Hj. Nofiyatul faroh dari fraksi PKB



8. Bapak H. Agus Sholichin dari fra ksi Golkar



9. Bapak Sayid Abdul Qodir dari fraksi PKB



10. Bapak Agung Yudhi Kurniawan dari fraksi PDI-P



iii. Biodata Penulis

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



- Nama : Anisa Ifadah
- NIM : 2001056032
- Program Studi : SI/Manajemen Haji dan Umrah
- Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 30 Januari 2002
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Alamat Asli : Desa Kabunan RT 03/01 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal Jawa Tengah
- Email : anisa.ifadah@gmail.com
- Jenjang Pendidikan Formal :
1. TK Miftahul Ulum Slawi (2007)
 2. SD Negeri Kabunan 1 (Lulusan 2014)
 3. MTs N 1 Tegal (Lulusan 2017)
 4. MAN 1 TEGAL (Lulusan 2020)
- Pendidikan Non-Formal :
1. MDTA Islamiyah Kabunan
 2. Pondok Pesantren Darul Khair Babakan-Lebaksiu-Tegal
 3. Pondok Pesantren Madrosatul Qur'an Babakan-Lebaksiu-Tegal
 4. Pondok Pesantren Raudlatul Hubbil Qur'an Babakan-Lebaksiu-Tegal
- Pengalaman Organisasi :
1. PR IPNU IPPNU Kabunan Dukuhwaru
 2. HMJ Manajemen Haji dan Umrah
 3. Iktasaba UIN Walisongo Semarang